

**POLITIK NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2019**

(Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

AHMAD ROBI ULZIKRI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

POLITIK NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019

(Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)

Oleh

AHMAD ROBI ULZIKRI

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki andil dalam perjalanan bangsa, salah satunya dalam hal politik. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 kembali melibatkan salah satu tokoh penting NU yaitu Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Publik meragukan suara NU dalam Pilpres 2019 dikarenakan faktor historis, kekalahan Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid dalam Pilpres 2004 adalah indikasi tidak solidnya elemen struktural dan kultural dalam tubuh NU. NU Bandar Lampung adalah cabang tertua di Lampung sejak tahun 1964 dengan keunikan warganya yang heterogen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya politik, partisipasi politik, dan sikap politik warga NU Bandar Lampung dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori budaya politik (Almond dan Verba), partisipasi politik (Milbrath dan Goel), dan teori sikap (Abu Ahmadi). Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan model *concurrent embedded*. Hasil penelitian menunjukkan, budaya politik warga NU struktural adalah partisipan dan warga NU kultural adalah subjek-partisipan, partisipasi politik warga NU struktural adalah pemain dan warga NU kultural adalah penonton, sikap politik warga NU struktural menunjukkan sikap positif (mendukung) dan kultural sebagian besar 65-99% positif (mendukung), 1-25% netral atau belum menentukan pilihan dan sisanya 0-10% bersikap negatif (tidak mendukung) terhadap pencalonan Ma'ruf Amin dikarenakan ikatan emosional (hubungan kiai-santri), latar belakang (Pilpres 2019 dimaknai sebagai perjuangan idiologi NU), dan persamaan prinsip (kebijaksanaan dalam mengambil keputusan).

Kata Kunci: Politik Nahdlatul Ulama, Budaya Politik, Partisipasi Politik, Sikap Politik

ABSTRACT

POLITICS OF NAHDLATUL ULAMA IN ELECTION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 2019

(Study Of Nahdlatul Ulama Citizens in Bandar Lampung)

By

AHMAD ROBI ULZIKRI

Nahdlatul Ulama (NU) is the largest social organization of religious communities in Indonesia that has a stake in the nation's journey, one of which is political. The 2019 President and Vice President general election again involved one of NU's important figures, Ma'ruf Amin, as a candidate for Vice-President to accompany Joko Widodo. The public doubted NU's voice in the 2019 Presidential Election due to historical factors, the defeat of Hasyim Muzadi and Salahuddin Wahid in the 2004 Presidential Election was an indication of the solid structural and cultural elements in NU's body. NU Bandar Lampung is the oldest branch in Lampung since 1964 with the uniqueness of its heterogeneous citizens. The purpose of this study was to find out how political culture, political participation, and the political attitude of the citizens of Bandar Lampung NU in addressing the nominations of Ma'ruf Amin as candidates for vice president in the 2019 president and vice presidential election. this is the theory of political culture (Almond and Verba), political participation (Milbrath and Goel), and the theory of attitude (Abu Ahmadi). This study uses a combination method with models *concurrent embedded*. The results showed that the NU's structural political culture was that participants and cultural NU citizens were subject-participant, the political participation of structural NU citizens was cultural players and NU citizens were spectators, the political attitudes of NU residents showed a positive (supportive) and cultural attitude 65 -99% positive (supportive), 1-25% neutral or not yet determined and the remaining 0-10% were negative (not supportive) towards the nomination of Ma'ruf Amin due to emotional ties (kiai-santri relations), background (Pilpres) 2019 is interpreted as NU's ideological struggle), and principle equality (wisdom in making decisions).

Keywords: Politics of Nahdlatul Ulama, Political Culture, Political Participation, Political Attitudes

**POLITIK NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2019
(Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)**

Oleh
AHMAD ROBI ULZIKRI

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **POLITIK NAHDLATUL ULAMA DALAM
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN 2019
(Studi pada Warga Nahdlatul Ulama
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Robi Ulzabri**

No. Pokok Mahasiswa : **1516021055**

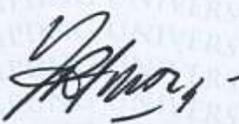
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. NIP 19780430 200501 1 00
Himawan Indrajat, S.IP., M.Si. NIP 19830727 200912 1 009

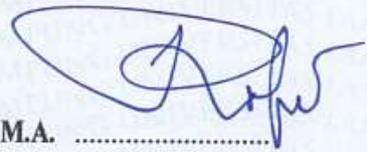
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

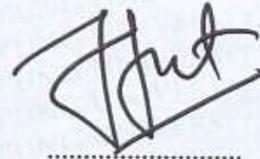
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

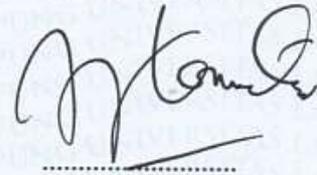
Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**



Penguji : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **12 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 April 2019
Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Robi Ulzikri
NPM. 1516021055

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Robi Ulzikri, dilahirkan di Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 16 Juli 1997 dari pasangan keluarga sederhana Bapak Roid Suganda dan Ibu Sumiati. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 1 Tegalreja, Banjarharjo, Brebes pada tahun 2003 dan lulus di tahun 2009. Penulis menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Banjarharjo pada tahun 2009 dan lulus tahun 2012. Selama SMP Penulis aktif dalam organisasi intra sekolah (OSIS). Selanjutnya, jenjang pendidikan penulis tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 2 Kalianda dan lulus tahun 2015, selama SMK penulis pernah mewakili Lampung Selatan dalam kejuaran Debat Bahasa Inggris SMK se-Provinsi Lampung pada tahun 2014 sebagai Quarter Finalis. Penulis sangat bersyukur pada tahun 2015 tercatat sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Semasa kuliah Penulis pernah aktif di Korps Muda BEM U

KBM Unila angkatan XI, Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Labpolotda) JIP FISIP UNILA dan Komunitas Baca UPT Perpustakaan Unila.

Penulis juga pernah mewakili Universitas Lampung dalam kejuaraan baik lokal maupun Nasional. Ditingkat Universitas penulis terpilih sebagai Duta Baca Perpustakaan Universitas Lampung pada tahun 2017, Juara 1 Debat Mahasiswa Tingkat Provinsi dalam FEBI Fest 2017 di UIN Raden Intan Lampung, dan Juara 1 Lomba Berbalas Pantun dalam Pekan Bahasa dan Sastra Provinsi Lampung 2018. Ditingkat nasional penulis pernah mewakili Unila dalam kompetisi Essai Inovasi Kebijakan Publik National Governance Day (NGD) 2016. Penulis juga pernah mewakili Universitas Lampung dalam Debat Politic and Government (Polgov) 2016 di Universitas Gajah Mada Jogjakarta dan meraih penghargaan sebagai Top Five Best Speaker. Di Tahun 2017 penulis kembali mewakili Unila dalam kompetisi essai National Governance Day 2017 di Universitas Padajajaran (Unpad) dan berhasil memperoleh juara ke-3 pada kelas Indonesia Sejahtera.

Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2018 di Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur sebagai Koordinator Desa (Kordes).

MOTTO

“Allah Akan Mengangkat Derajat Orang-Orang Yang Beriman Di Antaramu dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Beberapa Derajat ”
(Al-Mujadalah:11)

“Gunakan Masa Muda dan Umur Untuk Memperoleh Ilmu Tanpa Terperdaya Oleh Rayuan, Karena Setiap Detik Yang Terlewatkan Tidak Akan Tergantikan ”
(Hadrotusyekh KH. Hasyim As’Ari)

“Semakin Tinggi Ilmu Seseorang, Semakin Besar Rasa Toleransinya”
(KH. Abdurrahman Wahid)

“Aku Akan Menulis dan Akan Terus Menulis, Sampai Tak Mampu Lagi Menulis”
(Mahbub Junaidi)

“Bangkit dan Sukses”
(Ahmad Robi Ulzikri)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim
Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah ikhtiar hamba-Mu,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan

Shalawat Teriring Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Yang Selalu dinanti Syafaafnya di Yaumul Akhir
Sebagai Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Umatnya

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada Sosok Luar Biasa

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Roid Suganda dan Sumiati

Kakak dan Adik tersayang

Ahmad Nur Yasin, Syifa Nur Annisa dan Nur Wasiqoh

Terimakasih untuk semua yang mendukung selesainya skripsi ini, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah S.W.T.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Politik Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik penulis.
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.

4. Bapak Himawan Indrajat, M.Si selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi dengan memberikan saran dan koreksinya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Drs. Hertanto, Ph.D., selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik.
6. *Almaruhum* ayahanda tercinta Bapak Drs. Yana Ekana, M.Si., yang selalu memberikan semangat, nasihat, dan memotivasi penulis semasa hidupnya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang selalu mengalir dan ditempat yang istimewa disisi Allah SWT.
7. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Ketua PCNU Kota Bandar Lampung dan Warga Nahdliyin Kota Bandar Lampung, serta seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis.
10. Kedua orang tua, Bapak Roid Suganda dan Ibu Sumiati yang senantiasa mendukung, berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu

yang didapatkan bisa menjadi amal jariyah yang selalu mengalir kepada Bapak dan Ibu tercinta serta memberikan nilai manfaat bagi banyak orang.

11. Kakak tercinta Ahmad Nur Yasin terimakasih telah memberikan doa dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan tinggi serta adikku Syifa Nur Annisa dan Nur Wasiqoh terimakasih atas doa dan dukungan moril sehingga menyulut semangat penulis untuk menyelesaikan studi di Ilmu Pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
12. Nenek tercinta Mbok Ngadiem yang selalu memberikan doa dan nasihat sehingga memberikan energi positif dan semangat untuk menyelesaikan studi pendidikan tinggi di Universitas Lampung ini dengan sebaik-baiknya.
13. Segenap keluarga besar yang ada di Brebes Jawa Tengah dan di Lampung Selatan. Terimakasih atas doa dan nasihatnya kepada penulis.
14. Seluruh sahabat PMII Rayon FISIP Komisariat Universitas Lampung yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga.

Bandar Lampung, 12 April 2019

Ahmad Robi Ulzikri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Kegunaan Penelitian	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Politik.....	23
B. Tinjauan Tentang Budaya Politik	24
1. Definisi Budaya Politik.....	24
2. Orientasi Budaya Politik	27
3. Tipe Budaya Politik	28
a. Budaya Politik Parokial	29
b. Budaya Politik Kaula Atau Subyek	30
c. Budaya Politik Partisipan.....	31
C. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik	34
1. Definisi Partisipasi Politik	34
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	35
3. Tipologi Partisipasi Politik	36
D. Tinjauan Tentang Sikap Politik	37
1. Definisi Sikap.....	37
2. Ciri-Ciri Sikap.....	38
3. Faktor-Faktor Pengaruh Pembentukan dan Perubahan Sikap.....	39
4. Sikap Politik.....	40
E. Tinjauan <i>Civil Society</i>	41
1. Definsi <i>Civil Society</i>	41

2. Bentuk-Bentuk <i>Civil Society</i>	43
3. Akar <i>Civil Society</i> di Indonesia.....	43
F. Tinjauan Tentang Struktural dan Kultural	45
G. Kerangka Fikir	47
III. METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Fokus Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian.....	58
D. Jenis Data dan Sumber Data	59
E. Populasi dan Sampel	61
1. Populasi.....	61
a. Kualitatif	61
b. Kuantitatif	61
2. Sampel.....	62
a. Kualitatif	62
b. Kuantitatif	65
F. Teknik Pengumpulan Data	67
G. Teknik Pengolahan Data	70
1. Kualitatif	70
2. Kuantitatif	71
H. Validitas dan Reliabelitas.....	73
1. Validitas Instrumen	73
2. Reliabelitas Instrumen.....	76
I. Teknik Analisis Data	78
1. Kualitatif	78
2. Kuantitatif	81
J. Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	82
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	84
A. Gambaran Umum NU di Bandar Lampung	84
1. Sejarah NU di Bandar Lampung	84
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung	87
3. Warga NU Bandar Lampung.....	90
4. Pondok Pesantren (Ponpes) NU di Bandar Lampung	91
a. Ponpes Madarijul Ulum	91
b. Ponpes Al-Hikmah	93
B. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.....	97
1. Calon Presiden dan Wakil Presiden	97
2. Sejarah Singkat Pemilu Presiden dan Legislatif di Indonesia.....	99
a. Zaman Demokrasi Parlementer	99
b. Zaman Demokrasi Terpimpin	100

c. Zaman Demokrasi Pancasila	101
d. Zaman Reformasi-Sekarang	107
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	112
A. Hasil Penelitian	112
1. Budaya Politik Warga NU di Bandar Lampung	113
a. Kognitif (Pengetahuan)	113
b. Afektif (Perasaan)	133
c. Evaluatif (Penilaian)	147
2. Partisipasi Politik Warga NU di Bandar Lampung	164
1. Partisipasi Warga NU Struktural Bandar Lampung	164
2. Partisipasi Warga NU Kultural Bandar Lampung	171
3. Sikap politik warga NU Kota Bandar	185
1. Sikap Politik Warga NU Struktural Bandar Lampung	185
2. Sikap Politik Warga NU Kultural Bandar Lampung	204
B. Pembahasan	216
1. Budaya Politik Warga NU Bandar Lampung	216
a. Budaya Politik Warga NU Struktural	218
b. Budaya Politik Warga NU Kultural	226
2. Partisipasi Politik Warga NU Bandar Lampung	234
a. Partisipasi Politik Warga NU Struktural	235
b. Partisipasi Politik Warga NU Kultural	237
3. Sikap Politik Warga NU Bandar Lampung	239
a. Sikap Politik Warga NU Struktural	241
b. Sikap Politik Warga NU Kultural	246
4. Alasan Warga NU Bandar Lampung Dalam Menyikapi Pencalonan Ma'rif Amin	252
a. Warga NU Struktural	252
b. Warga NU Kultural	254
VI. SIMPULAN DAN SARAN	257
A. Simpulan	257
B. Saran	262

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	14
2. Tipe-Tipe Budaya Politik	27
3. Definisi Konsep.....	56
4. Definisi Operasional.....	56
5. Data Informan	63
6. Skoring Skala Guttman	72
7. Kriteria Reliabelitas	78
8. Kriteria Persentase	82
9. Pengurus PCNU Bandar Lampung	87
10. MWCNU Bandar Lampung.....	90
11. Pendidikan YPPI AL-Hikmah	94
12. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019.....	98
13. Triangulasi Teknik Orientasi Kognitif.....	132
14. Triangulasi Teknik Orientasi Afektif	146
15. Triangulasi Teknik Orientasi Evaluatif.....	163
16. Triangulasi Teknik Partisipasi Politik NU Struktural.....	173
17. Triangulasi Teknik Partisipasi Politik NU Kultural.....	184
18. Triangulasi Teknik Sikap Politik NU Struktural.....	203
19. Triangulasi Teknik Sikap Politik NU Kultural	215
20. Tipe Budaya Politik Warga NU Struktural	226
21. Tipe Budaya Politik Warga NU Kultural.....	233

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Afiliasi Ormas Islam Indonesia.....	6
2. Keanggotaan Ormas Islam Indonesia	7
3. Kerangka Pikir	50
4. Disain Model Concruent Embedded Qualitatif sebagai Data Primer	52
5. Langkah Penelitian Kualitatif Sebagai Data Primer.....	52
6. Situasi Sosial Penelitian Kualitataif	61
7. Struktur Organisasi Ponpes Al-hikmah.....	96
8. Diagram Orientasi Kognitif Santri Warga NU Bandar Lampung.....	130
9. Seminar Arus Baru Ekonomi Syariah Maruf Amin	139
10. Diagram Afektiv Santri Warga NU Bandar Lampung.....	143
11. Diagram Evaluatif Santri.....	158
12. Pengamat Politik UINAM.....	160
13. Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	161
14. Penetapan Hasil PPK	169
15. Caleg Tokoh NU	170
16. Pelantikan Rumah KMA Korwil Lampung	172
17. Penghargaan Tokoh NU	176
18. Demonstrasi Penolkan <i>full day school</i>	180
19. Diagram Partisipasi Politik Santri.....	179
20. Salinan Surat Keputusan KPU RI	186
21. Ketua Umum PBNU	187
22. Deklarasi Santri Lampung Untuk Jokowi	192
23. Tokoh NU Bandar Mengikuti Deklarasi Dukung Jokowi	193
24. Deklarasi Tokoh NU dan Santri Dukung Jokowi-Maruf	194
25. Tokoh NU Bandar Lampung di Rumah Pemenangan Maruf Amin	196
26. Foto Maruf Amin di Rumah KMA Lampung	201
27. Andre Rosiade	212
28. Diagram Persentasi Sikap Politik Santri	213

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi masyarakat keagamaan terbesar yang ada di Indonesia. NU berdiri sejak 31 Januari 1926 atau tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, Jawa Timur. Khairuddin Tahmid dalam Mukri dkk (2016:11) menjelaskan bahwa pendirian NU dilatarbelakangi untuk melestarikan ajaran kaum pesantren (tradisionalis) yang mempertahankan dan mengembangkan paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*. Kesadaran yang mendalam akan nasionalisme terhadap penjajahan kolonial Belanda, gerakan modernis, dan gejolak Timur Tengah yang mengancam eksistensi Islam tradisionalis menjadi pendorong kelahiran organisasi NU.

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Bab 1 Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa NU merupakan organisasi atau perkumpulan (*jamiyah*) yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa; Pertama, dibidang agama, NU mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham *ahlusunnah waljamaah*. Kedua, dibidang pendidikan,

NU berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, dibidang sosial, NU berupaya mendorong pemberdayaan dibidang kesehatan, kemaslahatan keluarga, dan pendampingan masyarakat.

Pasal 5 AD/ART organisasi NU menjelaskan bahwa NU beraqidah islam menurut faham *ahlusunnah waljamaah* yaitu faham Islam yang moderat (*wasathiyyah*) yang mana dalam aqidah mengikuti *mahdzab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dalam fiqih mengikuti salah satu dari Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti Madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Tujuan NU adalah terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan bagi terciptanya rahmat bagi semesta.

Bab VI Pasal 12 AD/ART menjelaskan secara struktural NU terdiri atas Pengurus Besar (Pusat), Pengurus Wilayah (Provinsi), Pengurus Cabang (Kabupaten/Kota), Pengurus Cabang Istimewa (Luar negeri), Majelis Wakil Cabang (Kecamatan), Pengurus Ranting (Desa/Kelurahan), dan Pengurus Anak Ranting (Dusun). Pada Bab VII Pasal 14 menjelaskan secara struktur kepengurusan NU terdiri dari Penasihat (*Mustasyar*), Pempinan Tertinggi (*Syuriah*), dan Pelaksana Harian (*Tanfidziah*).

NU kultural merupakan orang NU yang tidak menempati pada salah satu kepengurusan di tubuh organisasi NU baik itu pada tingkat pusat (PBNU) maupun di tingkat paling bawah, sampai ke Badan Otonom (BANOM)-nya tetapi amalannya adalah amalan NU (Sumber: Ichwan Adji Wibowo dalam wawancara dengan peneliti di kantor PCNU kota Bandar Lampung, pada 17 September 2018, pukul 22.00).

NU memiliki andil dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. NU telah berperan dalam perjuangan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek dimana NU memiliki pengaruh yang sangat besar adalah dalam konteks politik. Sejak pemilu 1955 ketika NU masih menjadi partai politik, NU menjelma sebagai 4 besar partai dengan perolehan suara terbesar bersama Masyumi, PNI, dan PKI. Konsistensi NU dalam politik hingga zaman demokrasi terpimpin (1959-1965) dan demokrasi Pancasila (1965) hingga akhirnya melalui kebijakan fusi partai politik oleh presiden Soeharto pada 1973 NU bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Sigit Pamungkas, 2011:178).

Hegomoni parpol sebagai dampak kebijakan fusi era Soeharto menjadikan 3 partai (Golkar, PPP dan PDI) sebagai partai mayoritas hingga akhirnya berakhir seiring runtuhnya rezim Soeharto menuju era reformasi (1998). Kontestasi politik era reformasi ditandai dengan diselenggarakannya pemilu 1999 dimana pada saat itu diikuti oleh 48 partai politik. PKB sebagai partai yang didirikan oleh kiai NU memosisikan dirinya pada

peringkat ketiga dengan 12,6 persen, disusul PPP dengan 10,7 persen (*ibid.*, hlm. 185).

Pemilihan umum tahun 2004 untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presiden secara langsung. Pemilu tersebut juga melibatkan tokoh sentral dalam bursa calon presiden dengan latar belakang NU seperti Hasyim Muzadi yang merupakan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU 1999-2004) yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri.

Salahudin Wahid (Gus Solah) menjadi tokoh NU lain yang masuk dalam bursa calon wakil Presiden. Gus Solah merupakan adik kandung Abdurrahman Wahid (Presiden ke-4 RI) yang juga merupakan tokoh NU mendampingi Wiranto dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2004. Kendati memiliki basis masa yang potensial, pencalonan tokoh NU tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Pemilu 2004 justru dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Politik nasional saat ini kembali melibatkan tokoh NU dalam kontestasi politik tanah air. Tanggal 9 Agustus 2018 di Menteng Jakarta Pusat, kubu petahana Joko Widodo telah memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019. Pada tanggal 20 September, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019, KPU

telah menetapkan keduanya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2019.

Secara struktural organisasi NU, Ma'ruf Amin merupakan mantan Ra'is Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau pimpinan musyawarah tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Penunjukan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bukan tanpa perhitungan. Kubu petahana mengharapkan akan mampu mendongkrak suara dari kelompok Islam dan menepis isu tentang agama yang kerap diarahkan kepada petahana. Isu-isu tersebut seperti pembubaran kelompok ormas Islam yang dianggap radikal, isu toleransi agama, serta merupakan bentuk anti tesa dari kubu penantang yang dicalonkan oleh *Ijtima Ulama* yang tidak sepemahaman dengan Ulama NU.

Joko Widodo mengatakan bahwa alasan pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi dirinya dilatarbelakangi beberapa alasan. Ma'ruf Amin dinilai sebagai sosok utuh tokoh agama yang bekerjasama, pernah menjadi anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, dan Wantimpres, Rais Aam PBNU dan juga Ketua MUI, selain itu berkaitan dengan kebhinekaan Ma'ruf Amin juga menjabat sebagai dewan pengarah Badan Pengawal Idiologi Pancasila (BPIP) (Sumber: <https://www.liputan6.com/teknoread/3614714/maruf-amin-jadi-cawapres-jokowi-warganet-serukan-alhamdullilahjoin> diakses pada 14 September 2018 pukul 21.24).

Suara warga Nahdliyin memang sangat potensial dalam politik nasional. Mengacu pada data Proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Mei tahun 2018 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 penduduk muslim Indonesia berjumlah 223,18 juta jiwa. Berdasarkan data dari Alvara Research Pada Desember 2016 hasilnya 50,3 persen penduduk Indonesia berafiliasi dengan NU, 14,9 persen berafiliasi dengan Muhammadiyah, dan 34,8 persen sisanya tersebar dalam beberapa ormas lain.

Gambar 1. Afiliasi Ormas Islam Indonesia



Sumber: Alvara Research Center Potret Keberagaman Muslim Indonesia Desember 2016

Potensial voters juga terlihat dari segi keanggotaan, dimana 36,1 persen penduduk muslim mengaku anggota NU, 6,3 persen anggota Muhammadiyah, dan sisanya tersebar dalam organisasi masyarakat lain. Jawa menjadi persentasi keanggotaan NU terbanyak dengan 50,7 persen diikuti Kalimantan, Maluku-Papua, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, dan Sulawesi.

Gambar 2. Keanggotaan Ormas Islam Indonesia



Sumber: Alvara Research Center Potret Keberagaman Muslim Indonesia Desember 2016

Pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo secara tidak langsung mendapat dukungan dari struktural PBNU melalui Ketua Umum Said Aqil Siradj. Kendati demikian Said Aqil mengatakan bahwa NU (Warga Nahdliyin) tidak perlu digerakan ataupun dibayar, warga NU akan mendukung (Ma'ruf Amin). NU tidak terlibat dalam politik praktis dan bukan partai politik, akan tetapi NU memiliki bobot politis (suara warga Nahdliyin). Dikarenakan yang maju (Cawapres) adalah Rais Aam PBNU, maka harus menang (Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/21334181/said-aqil-sebut-warga-nu-akan-dukung-maruf-amin-tetapi> diakses pada 14 September 2018 pukul 21.31).

Ma'ruf Amin menilai dukungan warga NU dari berbagai daerah terhadap dirinya sudah solid hingga akar rumput (*grassh root*). Ma'ruf juga meyakini bahwa kader NU di beberapa daerah basis NU seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara,

Jambi, dan Riau telah solid mendukungnya (Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/12/16135971/maruf-amin-yakin-suara-nu-solid-hingga-akar-rumput> diakses pada 2 Februari 2019 pukul 8.32)

Salah satu yang menjadi permasalahan adalah publik menilai dukungan terhadap Ma'ruf Amin tidak sepenuhnya dipastikan bulat hal ini dikarenakan terdapat dua elemen dalam warga Nahdliyin, yaitu warga Nahdliyin yang ada dalam kepengurusan NU (struktural) dan warga Nahdliyin yang berada diluar kepengurusan NU (kultural) yang berbeda dalam penafsiran Khittoh NU 1926 terkait pencalonan Ma'ruf Amin. Hal tersebut yang kemudian di Jawa Timur muncul Komite Khittoh NU 1926 yang terdiri dari tokoh Kultural dan pondok pesantren NU yang dikenal dengan *dzuriyah* (anak cucu pendiri) NU yaitu Solahudin Wahid dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Wahib Wahab dari Pondok Pesantren Tambak beras, dan beberapa tokoh lainnya.

Andrianto, Presidium Persatuan Pergerakan menilai bahwa suara Kiai NU yang ada di dalam struktural jumlahnya lebih sedikit dibanding Kiai NU kampung yang secara kultural memiliki basis lebih banyak di masyarakat. Kiai Kampung itulah pemegang real suara NU, dimana mereka memiliki pengaruh besar terhadap lumbung suara internal NU (Sumber: <https://akurat.co/id-284738-read-warga-nu-yang-dukung-jokowimaruf-diprediksi-hanya-1000-orang> diakses pada 14 September 2018 pukul 23.46).

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menambahkan bahwa kendati Ma'ruf amin merupakan Rais Aam PBNU, tidak menjamin warga NU akan memilih Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Namun pasangan calon tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mengambil suara basis nahdliyin (Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/18/pdngq9428-pengamat-belum-tentu-warga-nu-pilih-jokowimaruf> diakses pada 15 September 2018 pukul 0.01).

Fakta politik nasional dirasakan juga hingga ke daerah salah satunya adalah Lampung. Lampung menjadi salah satu daerah basis kekuatan NU di Sumatera. Sehingga Lampung kerap disebut Jawa Timurnya NU di Sumatera. Lembaga Survey Kuadran pada Februari 2018 sebagaimana dilansir dalam laman <http://www.nu.or.id/post/read/86221/survei-terbaru-muslim-di-lampung-72-persen-nu>, merilis data bahwa 95,50% penduduk muslim di Lampung sebanyak 72% atau 4,5 juta orang adalah sebagai warga NU.

Sebelum pasangan calon Presiden dan wakil presiden ditetapkan, dinamika politik warga NU di Lampung sudah terlihat ketika santri dari berbagai pondok di Lampung dan Ulama sudah mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden. Ketua koordinator aksi, Malika Saadah mengatakan bahwa aksi tersebut murni dari santri dan tidak berafiliasi dengan NU. Kahabibul Mutaqin yang

merupakan Sekretaris PCNU Kota Bandar Lampung juga turut hadir dalam deklarasi yang mengatasnamakan Santri Lampung Untuk Jokowi pada Jumat (3/8/2018), kendati tidak mengatas namakan NU (Sumber: <http://lampung.tribunnews.com/2018/08/03/santri-lampung-deklarasi-dukung-jokowi> diakses pada 15 September 2018 pukul 10.01).

Peneliti melihat pada tiga aspek argumentasi yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu historis, struktural, dan sosilogis. Secara historis, Bandar Lampung dapat dikatakan sebagai representasi NU di Lampung. Sejak Pendirian NU pada tahun 1964 di Lampung, Bandar Lampung menjadi salah satu kota tertua yang dapat merepresentasikan NU di Lampung. Dimana saat itu terdapat tujuh cabang yaitu Teluk Betung, Kota Bumi, Menggala, Krui, Sukarame, Kota Agung, dan Talang Padang. Secara sosiologis, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 2016, jumlah penduduk Bandar Lampung sebanyak 1.251.642 jiwa. Penganut islam menjadi agama mayoritas sebanyak 92,63% dari jumlah penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan ketua PCNU Kota Bandar Lampung jumlah warga NU Bandar Lampung belum bisa dihitung secara pasti, namun PCNU mengklaim secara kuantitatif berada di angkaka 50-55 % penduduk muslim di Bandar Lampung. Jika diasumsikan dengan data BPS tahun 2016 dengan penduduk muslim Bandar Lampung sebesar 92,63 % atau 1.164.027 jiwa, itu artinya klaim warga NU di Bandar Lampung berkisar \pm 640.213 jiwa. Kecamatan dengan sebaran NU terbesar berada di Kemiling, Tanjung Karang Pusat, Bumi Waras,

Panjang, dan Teluk Betung. (Sumber: Wawancara Peneliti dengan Ketua PCNU Kota Bandar Lampung).

Kondisi heterogen yang ada di Bandar Lampung justru menambah keunikan tersendiri terkait kultur dan budaya politik masyarakatnya. Bandar Lampung juga menjadi tolak ukur kemajuan partisipasi masyarakatnya mengingat kegiatan-kegiatan dan aksi yang berkaitan dengan politik kerap digelar di Ibu kota provinsi tersebut. Dan yang ketiga adalah secara struktural, NU di Bandar Lampung dibawah PCNU Kota, memiliki akses informasi yang cepat dari pengurus NU tingkat atasnya yaitu PWNU karena PWNU berada di Kota Bandar Lampung. Bagi peneliti hal tersebut memiliki keunikan dibandingkan dengan kota dan daerah lain di Provinsi Lampung.

Struktur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung Masa Khidmat 2017-2022 terdiri dari Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidjiah. Mustasyar diantaranya adalah Drs. KH. Hafiddudin Hanief, Syuriah diantaranya KH. Izzudin Abdusalam sebagai Rais Syuriah, dan Tanfidjiah adalah Ichwan Adji Wibowo sebagai Ketua Tanfidjiaiah. (Sumber: <http://mui-lampung.or.id/2017/11/05/inilah-struktur-pcnu-kota-bandar-lampung-masa-khidmat-2017-2022/>, diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 11.03).

Salah satu basis warga Nahdliyin adalah lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren dan kiai. Kiai dalam kehidupan pesantren memiliki otoritas yang mutlak. Sebagai organisasi masyarakat (Ormas) yang lahir dari rahim pesantren, maka pesantren identik dengan NU (Nurlira Gocing, 2015:3). Bandar Lampung berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, tercatat terdapat 61 (enam puluh satu) Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Bandar Lampung. Pondok Pesantren ternama yang memiliki hubungan erat dengan NU diantaranya adalah Pondok pesantren Madarijul Ulum (Kemiling) dan Al-Hikmah (Way Halim).

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana Politik Nahdlatul Ulama dalam aspek budaya politik, partisipasi politik, dan sikap politik warga Nahdliyin Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019, mengingat terdapat tokoh NU yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Selain itu warga Nahdliyin memiliki ciri khas kepatuhan terhadap kiai sebagaimana tradisi pondok pesantren dimana santri patuh terhadap kiainya (A. Gaffar Karim, 1995:90).

Peneliti Menganalisis hal tersebut menggunakan teori Gabriel Almond dan Verba (1984:16) tentang kebudayaan politik yang meliputi budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. Partisipasi politik dapat dianalisis menggunakan teori Milbarth dan Goel dalam Miriam Budiardjo

(2017:372) yang membagi tipe partisipasi politik dalam pemain, penonton, dan apatis. Menganalisis sikap politik warga Nahdliyin, peneliti menggunakan teori Abu Ahmadi (2009:153) dimana sikap politik dibagi menjadi tiga jenis yaitu sikap setuju, sikap menolak, dan sikap netral terhadap pencalonan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sedangkan konsep struktural dan kultural NU peneliti menggunakan konsep A. Gafar Karim (1995:251-252).

Peneliti menganalisis politik NU berdasarkan beberapa elemen warga Nahdliyin, yaitu elemen struktural (Pengurus NU) dan elemen kultural warga NU (Kiai/Tokoh NU dan santri Pesantren di Bandar Lampung). Aspek pengurus, peneliti meneliti perwakilan pengurus Penasihat (Mustasyar), Pempinan Tertinggi (Syuriah), dan Pelaksana Harian (Tanfidziah) PCNU Kota Bandar Lampung, serta diperkuat elemen struktural dari 5 MWCNU di lima kecamatan mayoritas NU. Sedangkan untuk menganalisis masyarakat NU secara kultural dan individu, peneliti meneliti pengasuh dan santri Pondok pesantren Madarijul Ulum (Teluk Betung Barat) dan Al-Hikmah (Tanjung Karang Pusat) karena pendidikan pondok pesantren tersebut mengajarkan prinsip-prinsip keilmuan NU.

Peneliti memilih elemen kultural NU pada kiai dan santri pondok pesantren karena dua hal. Pertama, Wasisto Raharjo Jati (2012) dalam Jurnal Ulul Albab menjelaskan bahwa pondok pesantren merupakan representasi kultural dari Nahdlatul Ulama. Wasisto juga menganalogikan bahwa NU merupakan sebuah pesantren besar, dan pesantren-pesantren

yang ada di pelosok-pelosok daerah adalah NU kecil, sehingga terjadi tarik menarik politis yang kausalistik kedua entitas tersebut.

Kedua, secara faktual di lapangan pendidikan pondok pesantren menajadi elemen kultural yang paling kuat bagi NU di Bandar Lampung, jika dibandingkan dengan thariqot, majelis, ataupun kelompok pengajian-pengajian lainnya. Jumlah warga NU di Bandar Lampung juga belum dipastikan secara kuantitatif dan belum ada data yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga untuk akurasi data dan kesesuaian masalah penelitian maka peneliti memutuskan untuk meneliti kiai dan santri pondok pesantren sebagai elemen kultural dalam subyek penelitian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di teliti saat ini. Penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Dita Adistia	2016	Skripsi	Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thabroni Harun dan Komarunnizar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015
2	Nico Purwanto	2018	Skripsi	Perilaku Pemilih Santri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu

				Tahun 2017 (Studi Pada Pondok Pesantren Riyadlotut Tholibin, Nurul Yaqin, dan Pondok Pesantren Nurul Huda)
3	Nur Nuzula	2014	Skripsi	Politik Elit Nahdlatul Ulama (NU) : Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2014
4	Nurlila Gonching	2015	Jurnal	Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru
5	Firman Noor	2014	Jurnal	Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Idiologi Politik di Era Reformasi
6	Karomani	2009	Jurnal	Ulama, Jawara, dan Umoro (Studi Tentang Elit Lokal di Banten)
7	H. Sadi	2016	Jurnal	Kiai dan Politik (Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 2009 di Genmore Kabupaten Banyuwangi)
8	Firdaus Muhammad	2015	Jurnal	Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama

Sumber : Diolah Penelti (2019)

Dita Adistia. (2016). Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thabroni Harun dan Komarunnizar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Peneliti tersebut menggunakan teori Gabriel Almon dan Verba (1984) tentang orientasi politik. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian Dita Adistia (2016) adalah sikap politik kiai dan santri menunjukkan sikap politik negatif terhadap pencalonan Thabroni Harun dan Komarunnizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2015. Kiai dan Santri pondok Al-Hikmah justru mendukung pesaing Thabroni yaitu Herman HN dan Yusuf Kohar. Sedangkan untuk tipe budaya politiknya, kelompok santri memiliki budaya politik subjek sedangkan Kiai memiliki budaya politik partisipan.

Nico Purwanto.(2018). Perilaku Pemilih Santri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017. Teori yang digunakan adalah tentang pendekatan perilaku pemilih (Ramlan Surbakti, 2010). Metode yang dinakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Nico Purwanto (2018) adalah santri memiliki ikatan sosiologis dan psikologis yang tinggi sedangkan pendekatan rasional santri rendah, serta derajat paternalistik yang tinggi dalam pertimbangan menentukan pilihan politiknya.

Nur Nuzula. (2016). Politik Elit Nahdlatul Ulama (NU): Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2014. Teori yang digunakan adalah teori elit politik (Vil Predo Pareto) dan strategi plitik (Michael Allison dan Judi Kaye). Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemihakan yang dilakukan oleh elit NU dalam pilpres 2014 merupakan sikap pribadi sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu, meski faktor organisasi juga ikut menentukan.

Penelitian Nur Nuzula (2016) NU tidak menggunakan strategi khusus pada pemilu 2014 karena NU bukan partai politik. Namun para elit menggunakan nama besar NU untuk menarik masa dalam pemilu. Terpecahnya pemihkan para elit NU merupakan bentuk tradisi dalam NU yang memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menentukan pilihan dan bukan merupakan strategi NU dalam berpolitik.

Nurlila Gonching (2015). Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru. Teori yang digunakan adalah tentang sejarah NU (Greg Fealy). Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aktivitas politik Nahdlatul Ulama pada masa orde baru dibagi dalam dua aktivitas yaitu berpolitik menggerakkan partai NU sedangkan NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan konsisten melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti dakwah dan pengajaran dalam hal pengembangan masyarakat. Namun pilihan dilematis terjadi bagi warga NU yang ada di organisasi sosial kemasyarakatan NU yang diafiliasikan dengan NU dan tarik menarik dengan PPP yang pernah menjadi partai fusi dari NU.

Firman Noor (2014). Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Idiologi Politik di Era Reformasi. Teori yang digunakan adalah tentang Budaya Politik Apter (1985), dan Almond dan Verba (1963). Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terjadinya pergeseran dari peran idiologi yang tergantikan dengan hal yang bersifat pragmatis.

Jurnal Firman Noor (2014) juga menganalisis tentang pemilihan presiden 2004 dimana terjadi perpecahan kekuatan islam yang tercermin dalam pencalonan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranti-Salahudin Wahid, Amin Rais-Siswono, Hamzah Has-Agung Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Suara NU terpecah di Surabaya yang merupakan sehingga pasangan Mega-Hasyim kalah di kantong ideologis NU tersebut. Faktor figur menjadi faktor keberhasilan SBY dalam pemilu 2004.

Karomani (2009). Ulama, Jawara, dan Umara: Studi Tentang Elit Lokal di Banten. Teori yang digunakan adalah tentang Elit Nashir (2000), Martin (1993), dan Weber dalam Vegger (1985). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah ulama, jawara, dan umara memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan religius, adat, dan jaringan kekuasaan pemerintahan masyarakat Banten. Otonomi daerah menjadikan jawara menjadi elit yang berkuasa, sedangkan ulama menjadi subordinasi jawara dan umara meskipun secara religius ulama tetap memiliki pengaruh yang sangat besar.

H. Sadi (2016). Kiai dan Politik (Nahdlatul Ulama dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi). Teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial dari Parson (1951). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah motif politik kiai di kecamatan Glenmore dalam berpolitik didasari atas motif doktrin keagamaan, kekuasaan, sosial, dan motif ekonomi, yang didominasi adalah motif pragmatis.

Firdaus Muhammad (2015). *Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori *civil society* Andree Fillard (1999) dan Hikam, AS (1999). Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah menggunakan pendekatan historis dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa transformasi gerakan politik keagamaan NU tidak lepas dari faktor historis yang membagai dalam tiga periode meliputi periode kiai dan pesantren (1926-1952), Periode kiai-politisi (1952-1984), dan periode kiai-intelektual (1984-sekarang). Perjalanan Politik NU sesuai dengan *setting politik* yang melahirkan kontekstualisasi gerkan yang fleksibel.

Perbedaan kedelapan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah peneliti pertama fokus penelitiannya mengkaji klasifikasi sikap dan budaya politik menggunakan teori Almond dan Verba dari kiai dan santri namun tidak menggali secara dalam faktor apa yang menyebabkan suara Kiai dan Santri justru memilih kepada pasangan yang bukan dari NU. Penelitian kedua hanya memfokuskan pada perilaku memilih santri dalam Pemilihan Bupati, namun tidak menjelaskan afiliasi pondok pesantren dengan NU dan tidak menjelaskan budaya serta partisipasi politik baik struktural NU maupun pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU.

Penelitian ketiga mencoba menggali sebab terjadinya pemihkan para elit NU namun tidak menggali bagaimana budaya dan sikap politik dari elit NU tersebut. Peneliti keempat menganalisis bagaimna dinamika politik NU pada masa orde baru dimana NU terlibat dan berafiliasi dengan partai

politik dan juga perannya sebagai organisasi kemasyarakatan namun tidak menjelaskan bagaimana sikap dan budaya politik NU secara jelas.

Peneliti Kelima berfokus menganalisa bagaimana terjadi pergeseran perilaku politik dari idiolgis menjadi pragmatis pada era reformasi, hal tersebut dikarenakan kalangan keagamaan seperti NU sangat cair dalam menentukan sikapnya, namun tidak menjelaskan bagaimana penyebab pergeseran perilaku politik tersebut pada organisasi kemasyarakatan seperti NU. Peneliti keenam lebih luas berfokus pada kepemimpinan elit ulama, jawara, dan umara dalam kehidupan masyarakat, namun tidak menjelaskan secara mendalam terkait ulama NU dalam analisisnya dan sedikit membahas tentang struktur elit NU struktural dan Kultural.

Peneliti ketujuh berfokus pada analisa motif keterlibatan kiai dalam politik praktis, namun tidak menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip politik kiai dalam perspektif *ahlusunnah waljamaah annahdliyah* serta kaitannya dengan budaya politik. Peneliti kedelapan berfokus pada analisis historis gerakan politik NU dari masa ke masa, namun peneliti tidak menjelaskan perubahan yang terjadi dalam konteks budaya, partisipasi, dan sikap politik warga Nahdliyin dalam pemilihan umum.

Peneliti saat ini mengkaji bagaimana politik Nhadlatul Ulama dalam aspek budaya politik, partisipasi politik, dan sikap politik. Peneliti menggunakan konsep struktural dan kultural NU (A. Gaffar Karim, 1995), budaya politik (Almond dan Verba, 1984), Partisipasi Politik (Milbarth dan Goel), sikap politik (Abu Ahmadi, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah tipe penelitian kombinasi (*mixed method*) dengan model *concurrent embeded*. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menginterpretasikan data kualitatif sebagai data primer dan data kuantitatif sebagai data sekunder.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam aspek budaya politik, partisipasi politik, dan sikap politik warga Nahdliyin Kota Bandar Lampung dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019?
2. Bagaimana alasan warga NU dalam menentukan sikap politiknya terhadap pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe budaya politik, partisipasi politik, sikap politik dan alasan sikap politik warga NU di Bandar Lampung dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan Jurusan Ilmu Pemerintahan tentang dinamika politik organisasi masyarakat keagamaan (ormas), khususnya dalam aspek budaya politik, partisipasi politik, dan sikap politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang berminat melanjutkan penelitian serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan evaluasi bagi organisasi masyarakat keagamaan khususnya NU di Bandar Lampung dalam memberikan pendidikan politik bagi warga NU dan dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana peran serta organisasi masyarakat khususnya keagamaan sebagai bagian dari sistem politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Politik

Miriam Budiardjo mendefinisikan politik sebagai usaha untuk menggapai tujuan berupa kehidupan yang baik. Miriam juga menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang mengatur kehidupan kolektifnya dengan baik, hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi terbatasnya sumberdaya alam sehingga perlu dicari sebuah cara distribusi sumber daya tersebut dengan tujuan agar semua warga negara dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Tujuan tersebut diperoleh melalui instrumen kekuasaan yang akan menentukan alokasi sumberdaya yang ada (Miriam Budiardjo, 2017:13-14).

Kekuasaan yang dimaksud oleh Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut. Konsep tersebut yang kemudian diartikan bahwa politik adalah segala macam kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan (*ibid.*, hlm. 17-18).

Andrew Heywood menjelaskan bahwa *Politic is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*. Politik diartikan sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan memngamandemen peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari fenomena konflik serta kerjasama (Andrew Heywood, 1997:4).

Konsep politik yang memiliki keterikatan dengan konflik dan konsensus lain juga dijelaskan oleh Rod Hague *et al* yang mengatakan *politic is the activity by which group reach binding collective decisions through attempting to reconclille diferences among their members*. Politik dimakanai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok untuk mencapai keputusan-keputusan kolektif dan mengikat sebagai usaha untuk mendamaikan perbedaan diantara anggota-anggota kelompok tersebut (Rod Hague, 1998:3).

B. Tinjauan Tentang Budaya Politik

1. Definisi Budaya Politik

Budaya politik merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di masyarakat. Budaya politik masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti tentang legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, partai politik, bahkan budaya politik juga

memasuki dunia keagamaan dan ekonomi sosial. Dengan demikian dapat diartikan bahwa budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan juga kaitannya dengan keputusan nasional yang berkaitan dengan pola alokasi sumber-sumber masyarakat (A Rahman H.I, 2007:267).

Budaya politik diartikan sebagai sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama di dalam masyarakat, tetapi setiap unsur di dalam masyarakat akan berbeda budaya politiknya, seperti hanya masyarakat umum dengan elit-elit di dalamnya. Benedit R.O'G Anderson dalam Rahman (2007:267) menilai bahwa kebudayaan di Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elit dan kelompok masa.

Gabriel A. Almon dan Powell dalam Rahman (2007:267) perbedaan elit dan masa dikarenakan budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sebuah sistem politik yang bersumber dari perilaku manusia. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai pola sikap, nilai dan keyakinan tentang politik, baik mereka sadar atau tidak sadar, eksplisit atau implisit (Newton dan Van Deth, 2010:171).

Gabriel A. Almon dan Verba melakukan kajian tentang perbandingan budaya politik di lima negara yang kemudian melahirkan sebuah buku yang berpengaruh pada pertengahan abad ke dua puluh (1960-1970) yaitu *The Civic Culture*. Almond mengasumsikan bahwa korelasi sistem politik akan mewujudkan orientasi dan tindakan politik. *“Kebudayaan Politik itu mengacu pada orientasi politik sikap warga*

negara terhadap peranan sistem politik dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut” (Almon dan Verba, 1984: 14).

Korelasi sistem politik dengan budaya politik juga dijelaskan oleh Miriam Budiardjo. Miriam mengungkapkan bahwa salah satu aspek penting dalam sebuah sistem politik adalah budaya politik (*political culture*). Miriam juga menjelaskan bahwa budaya politik merupakan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik yang meliputi norma-norma, pola orientasi terhadap politik, dan juga pandangan hidup pada umumnya (Miriam Budiardjo, 2017:58).

Miriam juga mengungkapkan bahwa budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik yang meliputi sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol individu dan beroperasi diseluruh masyarakat beserta harapan-harapannya. Budaya politik juga tidak lahir begitu saja melainkan dipengaruhi oleh faktor seperti sejarah perkembangan dari sebuah sistem, agama yang terdapat dalam masyarakat tersebut, kesukuan, status sosial, konsep tentang kekuasaan, dan kepemimpinan (*ibid.*, hlm.59).

Terdapat dua sistem yang perlu diketahui mengapa kebudayaan politik menjadi penting untuk dipelajari. Sistem yang pertama adalah bahwa setiap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi ini lah yang kemudian akan mempengaruhi tuntutan dan dukungan dari warga negara tersebut

terhadap penguasa. Sistem yang kedua adalah bahwa dengan mengerti sifat dan korelasi antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya akan membentuk sikap menghargai cara-cara yang mengarah pada perubahan yang pada akhirnya sistem politik akan berjalan lebih demokratis dan juga stabil (A Rahman H.I, 2007:269).

2. Orientasi Budaya Politik

Kajian tentang budaya politik pertama dan paling berpengaruh adalah buku *The Civic Culture* (1963) oleh Gabriel A. Almond (1911–2002) dan Sidney Verba (1932–). Keduanya mendefinisikan budaya politik sebagai pola politik orientasi ke objek politik seperti parlemen, pemilu atau bangsa (Newton dan Van Deth, 2010:175). Mereka kemudian membagi budaya politik ke dalam tiga orientasi sebagai berikut:

1. Orientasi Kognitif

Orientasi kognitif dimaknai sebagai sebuah pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, politik, peranan, dan segala kewajiban seta input dan outputnya.

2. Orientasi Afektif

Merupakan sebuah orientasi budaya politik dimana kecenderungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilanya.

3. Orientasi Evaluatif

Orientasi evaluatif merupakan sebuah orientasi dimana pertimbangan terhadap sistem politik menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan sistem dengan informasi dan perasaan.

Berdasarkan ketiga orientasi budaya politik diatas maka istilah kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai sub kultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat secara umum. Selain itu cerminan budaya politik merupakan alat pembentuk konsep (*conceptual tool*) yang sangat berharga, yang dapat menghubungkan atau mempertemukan individu dalam lingkungan politik dengan sistem politik sebagai kesatuan (A Rahman H.I, 2007:269).

3. Tipe Budaya Politik

Budaya politik dibedakan dalam tiga tipe kebudayaan yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek, dan budaya politik partisipan. Klasifikasi tersebut mengacu pada beberapa aspek seperti kepada objek politik apa, aktor politik individual yang memiliki orientasi politik, lalu bagaimana cara mereka mengorientasikan diri, dan bagaimana objek-objek tersebut terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Almond dan Verba, 1984: 20-22).

Tabel 2. Tipe-Tipe Budaya Politik

	Sistem Sebagai Obyek Umum	Obyek-obyek Input	Obyek-Obyek Output	Pribadi Sebagai Partisipan Aktif
Parokial	0	0	0	0
Subyek	1	0	1	0
Partisipan	1	1	1	1

Sumber: Almon dan Verba (1984:19)

Berdasarkan matrik diatas, maka dapat diklasifikasikan tiga budaya politik tersebut sebagai berikut:

a. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial memiliki peranan politik atau partisipasi politik yang rendah. Rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor kognitif masyarakat seperti tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik ini terdapat dalam sebuah sistem politik yang sederhana dan tradisional, dimana ciri khas spesialisasi masih terbilang kecil dan sederhana. Budaya politik parokial ditandai tidak berkembangnya harapan-harapan terhadap perubahan yang ada dalam sistem politik. Budaya politik parokial juga mengindikasikan bahwa di dalam masyarakat tidak mengharapkan apapun dari sistem politik tersebut.

Budaya politik parokial mencerminkan sebuah sikap dimana masyarakatnya tidak menyadari bahwa ia merupakan bagian dari warga negara. Masyarakat dalam budaya parokial ini lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Pengetahuannya yang minim terhadap sistem politik, sehingga

tidak peduli terhadap apa yang terjadi di dalam sistem politik tersebut. Bahkan yang lebih memprihatinkan dalam budaya politik ini adalah masyarakat mengabaikan tentang keberadaan pemerintah dan tidak mengharapkan apapun dari keberadaannya (*ibid.*, hlm.20).

b. Budaya Politik Kaula atau Subjek

Dilihat dari orientasinya terhadap sistem politik, budaya politik kaula terbilang tinggi. Namun sangat paralel dengan intensitas orientasi mereka terhadap masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik bisa dikatakan nol. Budaya politik kaula memiliki peran yang pasif dan lemah. Secara subjek individual masyarakat menyadari akan adanya otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi. Dalam budaya politik subjek ini masyarakat sudah secara aktif memiliki orientasi terhadap pemerintah dan bahkan sebaliknya tidak menyukainya.

Kendati telah menyadari hal tersebut, masyarakat masih memandang posisi subjeknya berkedudukan pasif. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berbudaya politik subjek masih meyakini bahwa posisinya tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadap perubahan sistem politik (*ibid.*, hlm.21).

Budaya politik subjek atau kaula biasanya terdapat di tengah masyarakat yang patuh terhadap otoritasnya namun tidak menghendaki diri dalam partisipasi politik dan pemilihan umum. Secara umum masyarakat menerima atau bersifat patuh (*obedient*) dan loyal segala keputusan yang di ambil pemerintah dan masyarakat memiliki keyakinan bahwa apapun yang telah diputuskan oleh pejabat itu bersifat mutlak dan tidak bisa dikoreksi apalagi ditentang. Akan tetapi sikap anggota masyarakat yang pasif bukan berarti secara potensial harus diabaikan (A Rahman H.I, 2007:270).

c. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan merupakan budaya politik dimana kondisi masyarakatnya sudah memiliki orientasi politik secara eksplisit terhadap struktur, proses politik, administratif, dan sistem secara keseluruhan. Perhatian masyarakat terhadap masukan (*input*) dan keluaran (*output*) sangat tinggi. Budaya politik ini anggota masyarakat telah memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor politik. Oleh karena itu masyarakat dengan budaya politik partisipan, dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input, dan output maupun posisi dirinya sendiri. Masyarakat dalam budaya politik ini memiliki sikap yang kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik dan

hampir terhadap semua aspek kekuasaan (A.Rahman H.I, 2007:270).

Budaya politik partisipan terdapat dalam masyarakat dimana individu-individunya telah mampu melibatkan diri dalam kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilu. Dilihat dari orientasinya, budaya politik partisipan memiliki orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang baik ditambah lagi dengan warga negara telah berperan sebagai individu yang aktif karena adanya sikap saling percaya antar warga negara sehingga mampu mengembangkan kultur demokrasi yang baik dalam sistem politik (Budi Winarno, 2008:18).

Dari ketiga tipe budaya politik tersebut dikombinasikan kembali kedalam tiga bentuk kebudayaan politik campuran sebagai berikut:

1) Budaya Politik Subyek Parokial (*The Parochial-Subject Culture*)

Budaya politik subyek parokial merupakan suatu tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang komprehensif dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Budaya politik subyek-parokial adalah peralihan dari struktur budaya politik

parokial (Parokialisme Lokal) menuju budaya politik subyek (pemerintahan terpusat).

2) Budaya Politik Partisipan Subyek (*The Subject-Participant Culture*)

Tipe budaya politik partisipan-subyek merupakan peralihan dari budaya politik subyek (pemerintahan terpusat) menuju budaya politik partisipan (demokratis). Proses peralihan tersebut akan mendukung pembangunan infrastruktur demokratis. Budaya politik ini juga sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sisa penduduk lainnya memiliki orientasi yang pasif.

3) Budaya Politik Parokial Partisipan (*The Parochial-Participant Culture*)

Budaya politik parokial-partisipan ini budaya yang dominan adalah parokial. Adapaun norma-norma yang struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan. Sehingga menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi dalam budaya politik ini adalah mengembangkan orientasi input dan output secara simultan (Almond dan Verba, 1984:27-31).

C. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara umum dapat di definisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara baik melalui cara langsung ataupun tidak secara langsung untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah (*public policy*). Kegiatan tersebut mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo, 2017:367).

Hebert McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan cara ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which member of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly, in the reformation of public policy*) (Miriam Budiardjo, 2017:367).

Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang (individual) atau kelompok orang (kolektif) baik yang terorganisir ataupun spontan, mantap atau sporadis, damai

ataupun dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif untuk ikut serta dalam kehidupan politik seperti dalam hal memilih pemimpin negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (A. Rahman H.I, 2007:285).

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Berdasarkan bentuknya partisipasi politik dibedakan atas dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional (A. Rahman H.I, 2007:288).

1) Bentuk Partisipasi Konvensional

Bentuk kegiatan partisipasi politik konvensional merupakan sebuah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Contoh dari partisipasi politik konvensional meliputi pemberian suara (*Votting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, ataupun komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

2) Bentuk Partisipasi Non-Konvensional

Bentuk kegiatan partisipasi politik non-konvensional merupakan sebuah bentuk partisipasi politik yang secara demokrasi tidak normal. Contoh dari partisipasi politik non-konvensional adalah Pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan keras politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), ataupun tindakan kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan, dan pembunuhan, serta perang gerilya dan revolusi.

3. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Milbarth dan Goel dalam Miriam Budiardjo (2017:372) membagi partisipasi politik dalam tiga tipologi yaitu Pemain (*Gladiator*), Penonton (*Spectator*), dan Apatitis (*Apathetic*).

1) Pemain (*Gladiator*)

Merupakan tipologi partisipasi politik yaitu orang-orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Selain itu tipologi ini memiliki peran sebagai komunikator, spesialis dalam mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai politik, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

2) Penonton (*Spectator*)

Merupakan tipologi partisipasi politik yaitu orang yang setidaknya pernah memakai haknya dalam pemilihan umum.

3) Apatis (*Apathetic*)

Apatis dimaknai sebagai tipologi partisipasi politik yaitu orang-orang yang tidak aktif sama sekali dengan dunia politik dan menarik diri dari proses politik termasuk dalam pemilihan umum.

D. Tinjauan Tentang Sikap Politik

1. Definisi Sikap

Sikap merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat akan memiliki ciri dan khasnya masing-masing. Sikap juga dapat mencerminkan bagaimana pola perilaku individu-individu didalam masyarakat dapat terlihat. Dengan sikap individu-individu dalam masyarakat tersebut bisa berkreasi terhadap objek di lingkungannya sebagai bentuk penghayatan terhadap objek tersebut. Perlu digaris bawahi sikap belum merupakan aktivitas akan tetapi sikap merupakan kecenderungan. Oleh karena sikap itulah diperkirakan tindakan-tindakan dan perilaku akan dilakukan terhadap objek yang dimaksud (Sudjiono Sastroatmodjo, 1995:4).

Thursione juga mendefinisikan bahwa sikap merupakan sebagai tingkatan efek baik itu positif maupun negatif dalam hubungannya dengan obyek-obyek psikologi. Thursione juga menjelaskan bahwa efek positif merupakan efek senang dengan demikian adanya sikap

menerima atau setuju. Efek negatif diartikan sebagai sikap menolak tidak senang, atau tidak setuju (Abu Ahmadi, 2009:150).

2. Ciri-Ciri Sikap

Sikap dapat dimaknai sebagai tabiat dalam korelasi dengan perangsang yang relevan. Dalam konteks ini sikap dapat dikatakan sebagai bagian dari faktor internal, akan tetapi tidak semua faktor internal itu adalah tentang sikap. Ciri-ciri sikap diantaranya adalah *Pertama*, Sikap itu dibentuk dan dipelajari selama perkembangan individu tersebut dalam hubungannya dengan objek. Artinya bahwa sikap bukan merupakan bawaan sejak lahir. Sikap merupakan hal yang dapat dipelajari, oleh karenanya sikap dapat berubah-ubah pada keadaan dan syarat-syarat tertentu dimana mempermudah sikap itu untuk berubah (Abu Ahmadi, 2009:165).

Kedua, Sikap itu berdiri sendiri (*stand alone*), namun mengandung hubungan tertentu dengan obyek. Objek dalam hubungannya dengan sifat dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi juga dapat berupa kumpulan objek serupa. *Ketiga*, Bahwa sikap sangat erat kaitannya dengan segi motivasi dan perasaan individu-individu (*ibid.*, hlm.165).

3. Faktor-Faktor Pengaruh Pembentukan dan Perubahan Sikap

Mengingat bahwa sikap merupakan kecenderungan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan syarat tertentu, maka ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan dan perubahan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor internal dan juga faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang terdapat dalam individu manusia. Faktor internal bisa berupa daya pilih seseorang (*selectivity*) untuk menerima dan memilih pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar.

2. Faktor Eksternal

Merupakan kebalikan dari faktor internal, faktor ini merupakan faktor yang terdapat dari luar pribadi manusia. Misalnya, interaksi sosial dengan lingkungan diluar kelompoknya. Contoh melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya sebagai hasil interaksi antara manusia dengan kebudayaan manusia yang sampai padanya (Abu Ahmadi, 2009:157-158).

4. Sikap Politik

Sikap politik merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan terhadap situasi dan keadaan tertentu. Diam juga merupakan sikap politik. Munculnya rasa ingin merubah suasana dalam lingkungan akan ditentukan oleh apa yang terkandung dalam dirinya seperti idealisme, nasionalisme, dan sebagainya (Alfian, 1982:134-135).

Sikap politik merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek tertentu yang bersifat politik, dimana reaksi tersebut sebagai bentuk penghayatan terhadap obyek tersebut. Sikap politik dapat memperkirakan perilaku politik apa yang kemungkinan akan muncul. Namun, perilaku politik tidak selamanya mewakili sikap politik seseorang (Sastroatmodjo, 1995:4-7).

Sikap dan perilaku politik itu tidak acak. Akan tetapi orang-orang yang berlatar belakang sama akan memiliki kecenderungan banyak kesamaan secara politis. Pekerja biasa akan berbeda dengan pekerja profesional ataupun manajer. Individu membangun ide-ide politik mereka disekitar situasi dan kepentingan pribadi mereka, dan ketika berbicara tentang kepentingan politik maka akan berbicara tentang kepentingan material (uang, promosi, pajak, keamanan, dan lain-lain) dan juga kepentingan ideal (nilai-nilai dan cita-cita politik, rasa keadilan dan kebebasan, keyakinan agama, dan lain-lain) (Newton dan Van Deth, 2010:172).

Sikap dapat diartikan sebagai kesiapan merespon yang bersifat positif, negatif, dan juga netral terhadap objek atau situasi yang konsisten. *Pertama*, Sikap positif merupakan sikap yang memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. *Kedua*, Sikap negatif merupakan sikap yang memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. *Ketiga*, Sikap netral merupakan sikap masyarakat yang tidak menunjukkan sikap setuju atau menolak (Abu Ahmadi, 2009:153).

E. Tinjauan Tentang *Civil Society*

1. Definisi *Civil Society*

Civil society berasal dari bahasa latin yaitu *civilis societas* yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Akar kata *civil* adalah *civilization* yang memiliki arti beradab sehingga *civil society* diartikan sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau *barbarian*. *Civil society* dapat dimaknai sebagai suatu gerakan rakyat untuk membebaskan diri dari hegemoni negara (Suryo S. Hadiwijoyo, 2012:74).

Mengacu pada definisi de'Tocqueville, AS Hakam mendefinisikan *Civil Society* sebagai suatu wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Muhammad AS Hikam, 1999:3).

Konsep *civil society* mengalami perkembangan sesuai dengan konteks, ideologi, dan kepentingan setiap subjek. JJ. Rousseau dan John Locke menggambarkan *civil society* sebagai suatu bentuk masyarakat yang beradab. Berbeda dengan Rousseau dan Locke, Hobes *civil society* merupakan identik dengan negara, dimana untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga negara, masyarakat sipil harus memiliki kekuasaan mutlak (Hadiwijoyo, S Sakti, 2012:84).

Pendekatan Hegelian lebih menekankan pada pemberdayaan sektor ekonomi dalam pembangunan *civil society* yang kuat. Gramsci memandang bahwa penguatan *civil society* sebagai instrumen menghadapi hegemoni ideologi negara, sedangkan Tocqueville memandang bahwa penguatan *civil society* pada penguatan organisasi dan asosiasi independen dalam masyarakat (*ibid*,.hlm.86-90).

2. Bentuk-Bentuk *Civil Society*

Kondisi *civil society* harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut, kemajuan dan kemunduruan, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya. *Civil society* berwujud dalam berbagai organisasi atau asosiasi yang dibuat oleh masyarakat diluar pengaruh negara. Bentuk-bentuk *civil society* diantaranya adalah:

- a. Lembaga swadaya masyarakat,
- b. Organisasi sosial dan keagamaan,
- c. Paguyuban, dan
- d. Kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*).

Tidak semua pengelompokan tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi ketika dihadapkan dengan negara (*state*) ataupun mengambil jarak dari kepentingan ekonomi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Gramsci dimana cendekiawan yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik (Muhammad AS Hikam, 1999:3).

3. Akar *Civil Society* di Indonesia

Akar-akar *civil society* di Indonesia bisa dilihat secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial ketika merkantilisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hasilnya mendorong para elit pribumimembentuk organisasi-organisasi modern

di awal abad ke-20 yang menandai berseminya *civil society* di Indonesia (*ibid.*,hlm.4).

Praktik sistem demokrasi parlementer yang diterapkan pada masa pasca revolusi (1950) dimana organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan bebas dan didukung kuat oleh warga masyarakat yang baru saja merdeka. Ikmim demikian tidak berlangsung lama, *civil society* mengalami penyusutan akibat dari krisis politik nasional ditambah kebangkrutan ekonomi secara masif. Ormas-ornas dan lembaga sosial berubah menjadi alat politik aliran (akhir dasawarsa 1950-an) dan awal dasawarsa 1960-an dimana *civil society* mengalami stagnansi (*ibid.*,hlm.4).

Rezim demokrasi dipimpin presiden Soekarno, *civil society* mengalami titik paling rendah dimana penggunaan mobilisasi masa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicurigai sebagai kontra-revolusi. Ketika rezim orde baru berkuasa *civil society* dan pertumbuhannya menampilkan berbagai paradoks seperti berkembangnya kelas menengah namun tidak memperlihatkan kemandirian, suburnya LSM dan ormas sebagai tulang punggung *civil society* namun justru lemah saat berhadapan dengan negara, dan pers sebagai simbol demokrasi yang masih terkekang dalam kebebasan (*ibid.*,Hlm. 6-7).

F. Tinjauan Tentang Struktural dan Kultural

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata struktural dimaknai sesuatu hal yang berkaitan dengan struktur, sedangkan kata kultural dimaknai sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Konsep struktural dalam perspektif teori struktural fungsional dimaknai sebagai jaringan kelompok yang memiliki hubungan kerjasama terorganisir, keteraturan dalam bekerja berdasarkan norma dan teori yang berkembang (Purwanto, 2008:12).

Dalam konteks kelompok sosial masyarakat (*massa society*) juga dibedakan atas kelompok sosial resmi (Formal Grup) dan kelompok sosial tidak resmi (Informal Grup). Formal grup ditandai dengan adanya anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) tertulis, memiliki pedoman tingkah laku yang dirumuskan secara tegas dan tertulis, serta bersifat tidak kekeluargaan, bercorak pertimbangan-pertimbangan rasional dan objektif. Informal grup ditandai dengan tidak adanya anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) tertulis, memiliki pedoman tingkah laku anggotanya tetapi tidak dirumuskan secara tegas dan tertulis (Abu Ahmadi, 2009:91).

Struktural dan kultural dalam konteks bahasa NU untuk menunjukan istilah formal dan informal dikenal dengan istilah *jamiyah* dan *jamaah*. Konsep *jamiyah* dimaknai sebagai lazimnya sebuah organisasi formal dimana ranah formal organisasi NU jika mengacu pada konsep khittah 1926 tidak diperkenankan adanya penggunaan instrumen struktural dalam

politik praktis. Sedangkan dimensi *jamaah*, NU tidak di-cover dalam suatu kerangka formal melainkan dalam sebuah nilai kultural yang dianutnya. Berdasarkan konsep diatas dapat dilihat bahwa di dalam NU terdapat suatu “Komunitas NU” yang tidak selalu terkait dengan NU sebagai organisasi resmi, dimana mereka merupakan kelompok masyarakat kultural yang diikat oleh satu tradisi keagamaan yang sama, dengan kepentingan-kepentingannya sendiri yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama yang menjadi panutan (A. Gaffar Karim, 1995:251-252).

Berdasarkan defnisi konsep diatas, dapat diperoleh satu kesamaan dalam penafsiran baik secara terminologi bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep formal dan informal kelompok sosial oleh Abu Ahmadi, dan Istilah *jamiyah* dan *jamaah* menurut A. Gaffar Karim dimana istilah struktural dimaknai sebagai keterlibatan individu dalam struktur kepengurusan organisasi NU secara resmi berikut dengan AD/ART dan produk hukum administratif lainnya, serta istilah kultural dimaknai secara kultur individu-individu melaksanakan pedoman tingkah laku sebagaimana ajaran yang dilakukan oleh NU akan tetapi tidak terlibat dalam kepengurusan formal NU.

G. Kerangka Pikir

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia. Basis suara NU dinilai cukup potensial untuk meraup kalangan islam tradisional yang menjadi mayoritas Islam di Indonesia. Oleh karena itu kubu petahana Joko widodo memilih Ma'ruf amin sebagai calon wakilnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara struktural NU, Ma'ruf Amin merupakan Ra'is Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau pimpinan musyawarah tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Suhu politik nasional dirasakan juga di Lampung yang merupakan salah satu basis NU di Sumatera. Maka Lampung kerap disebut sebagai Jawa Timur-nya NU di Sumatera. Bandar Lampung memiliki keunggulan jika ditinjau secara historis, struktural, dan sosiologis terhadap persebaran NU di Lampung. Selain itu Bandar Lampung sebagai tempat konstelasi politik begitu kuat. Secara struktural NU di Bandar Lampung dibawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Khitah 1926 secara tegas NU tidak terlibat dalam politik praktis namun tidak membatasi hak politik warga NU itu sendiri. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah publik menilai dukungan terhadap Ma'ruf Amin tidak sepenuhnya dipastikan bulat hal ini dikarenakan terdapat dua elemen dalam warga Nahdliyin, yaitu warga Nahdliyin yang ada dalam kepengurusan NU (struktural) dan warga Nahdliyin yang berada diluar kepengurusan NU (kultural). NU Kultural melalui Kiai

kampung dan sepuh kerap memiliki penadangnya tersendiri dalam hal politik praktis dan mereka lebih fokus pada pendidikan agama di pesantren dan orientasi pembangunan umat.

NU yang ada di dalam struktural jumlahnya lebih sedikit dibanding Kiai NU kampung yang secara kultural memiliki basis lebih banyak di masyarakat. Inilah yang kemudian Kiai Kampung memiliki pengaruh besar terhadap lumbung suara internal NU. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul pertanyaan besar, bagaimanakah politik NU jika dilihat dari aspek budaya politik, partisipasi politik, dan sikap politik warganya (Nahdliyin) dalam menyikapi pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, mengingat calon wakil presiden Ma'ruf Amin yang menjadi wakil Joko Widodo adalah tokoh penting dalam NU.

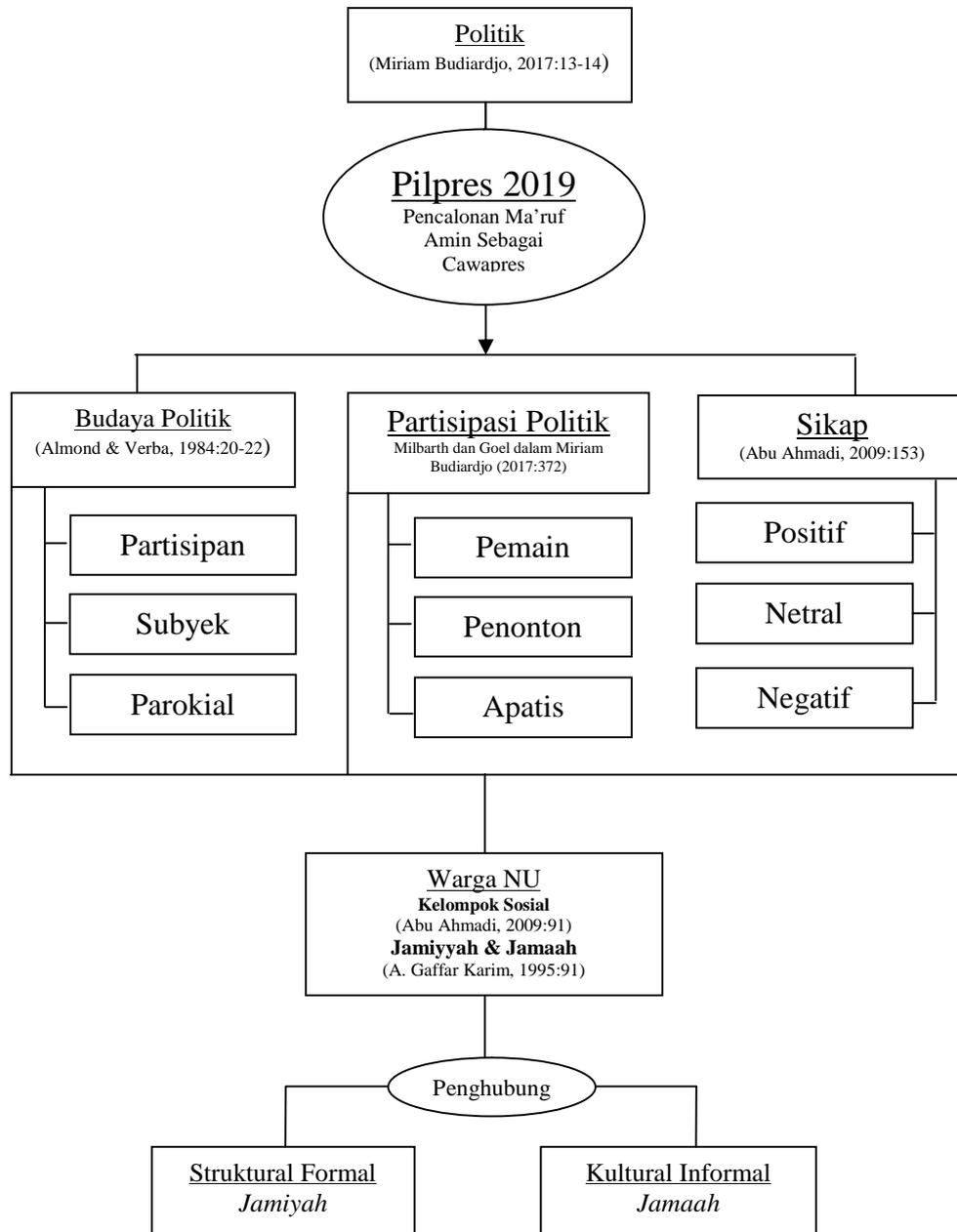
Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini sebagaimana telah ditulis dalam tinjauan pustaka yang meliputi Struktur dan kultural (A.Gaffar Karim, 1995:251-252) dan teori politik yang meliputi budaya politik (Almond dan Verba, 1984), partisipasi politik (Milbarth dan Goel), serta Sikap Politik (Abu Ahmadi, 2007).

Budaya politik warga NU dapat dilihat dari seberapa pemahaman warga NU terhadap dinamika pilpres 2019 dan kepercayaan terhadap kebijakan pengurus NU. Partisipasi politik warga NU diklasifikasikan dalam partisipasi politik sebagai pemain, penonton, dan apatis. Adapun partisipasi politik warga NU dilihat dari seberapa aktif dalam kebijaksanaan yang ada di internal NU, lembaga politik dan pemerintahan, serta

sejauhmana keterlibatan warga NU dalam proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya akan diperoleh sikap terhadap pencalonan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden 2019.

Analisis sikap politik warga NU berdasar teori sikap (Abu Ahmadi, 2009:153) yang diklasifikasikan dalam sikap menyetujui pencalonan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (positif), sikap menolak terhadap pencalonan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (negatif), dan sikap netral diamana tidak setuju dan tidak menolak terhadap pencalonan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga kerangka fikir dalam penelitian ini dapat di tulis berdasarkan bagan sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Pikir



Keterangan:



: Menghasilkan

: Ditentukan

III. METODE PENELITIAN

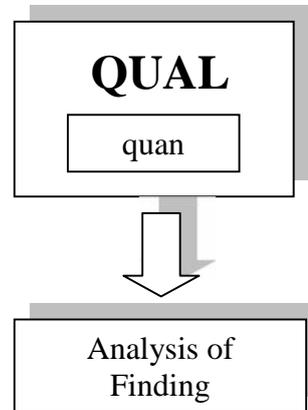
A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian kombinasi (*mixed method*) dengan model *concurrent embeded*. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menginterpretasikan data kualitatif sebagai data primer dan data kuantitatif sebagai data sekunder. Ronny Kountur (2003:105) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau penguraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:63-64).

Penelitian dengan metode kombinasi merupakan suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid reliabel, dan objektif. Peneliti menggunakan tipe penelitian kombinasi dengan model *concurrent embedded*. Model *concurrent embeded* merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kualitatif

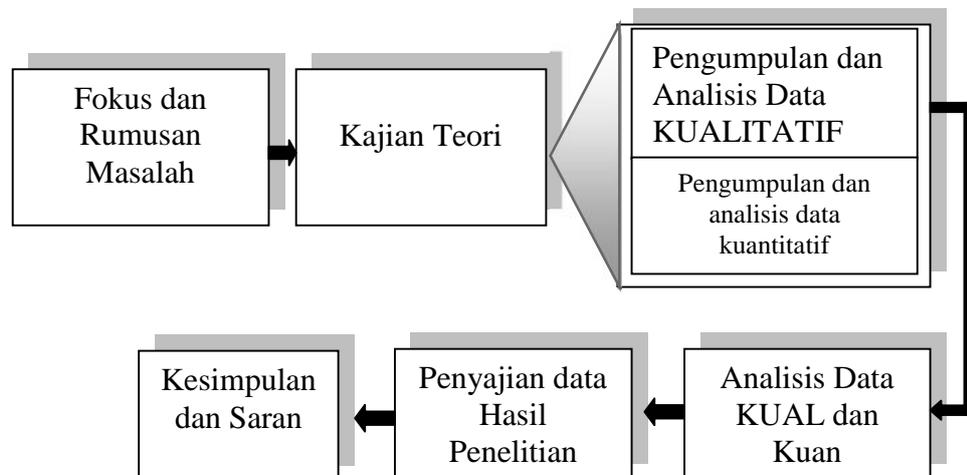
dan kuantitatif secara simultan, tetapi memiliki bobot yang berbeda (Sugiyono, 2016:404-412).

Gambar 4. Disain Model Concruent Embedded Qualitatif sebagai



Metode penelitian kombinasi dengan model campuran tidak berimbang (*concurrent embedded*) merupakan metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara tidak berimbang. Penelitian ini menggunakan model *concurrent embedded* dimana kualitatif sebagai metode primer dan kuantitatif sebagai sekunder (*ibid.*, Hlm.537).

Gambar 5. Langkah Penelitian Kombinasi kualitatif sebagai metode primer



Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, selanjutnya peneliti kualitatif mengumpulkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi ataupun gabungan ketiganya. Bersamaan dengan pengumpulan data dengan metode kualitatif (data primer), peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan metode kuantitatif (data sekunder) untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kualitatif yang telah ditemukan (*ibid.*, Hlm.341).

Terdapat dua elemen yang menjadi subjek analisis dalam penelitian yaitu warga NU yang ada di struktural kepengurusan dan warga NU berada diluar struktural kepengurusan NU (Kultural) di Bandar Lampung. Maka dibutuhkan dua metode pendekatan yang berbeda agar dapat diperoleh data yang maksimal. Data waraga NU struktural, kiai pondok pesantren, dan pihak akademisi netral diperoleh dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, karena untuk memperoleh informasi dan data ketiganya diperlukan wawancara yang mendalam, serta dalam hal etika ketiganya merupakan elit dan tokoh yang tidak bisa diperoleh dengan melalui instrumen kuisioner ataupun data kuantitatif.

Data NU kultural yang terdiri dari santri pondok pesantren diperoleh dengan pendekatan metode kuantitatif melalui instrumen penelitian berupa angket. Data kuantitatif digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi data kualitatif yang telah digunakan sebelumnya untuk meneliti tokoh kiai dan pengasuh pondok pesantren. Berdasarkan penjelasan diatas maka penggunaan

metode penelitian kombinasi dengan model campuran tidak berimbang (*concurrent embedded*) sangat tepat digunakan untuk meneliti subjek penelitian yang memiliki karakteristik yang beragam dalam satu penelitian serta untuk memperoleh data yang kompleks.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Penetapan fokus sebagai penelitian penting artinya dalam usaha menentukan batas penelitian (Molleong, 2005:92).

Penelitian ini berfokus pada Politik NU berdasar pada aspek budaya politik (Almond dan Verba ,1984) partisipasi politik Milbarth dan Goel dalam Miriam Budiardjo (2017), sikap politik Abu Ahmadi (2009) terkait pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2019. Tahapan pemilu yang menjadi fokus penelitian ini adalah tahapan penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Penetapan nomor urut pasangan calon, dan masa kampanye Capres dan Cawapres periode September 2018 hingga Januari 2019.

Metode penelitian kombinasi (*mix method*) dengan model campuran tidak berimbang (*concurrent embedded*) terdiri atas data kuantitatif sebagai data sekunder, maka diperlukan instrumen penelitian berupa kuisisioner untuk memperoleh data penelitian. Kuisisioner diperoleh berdasarkan definisi konsep serta definisi operasional dari teori tersebut sehingga diperoleh indikator dari masing-masing variabel yang ada. Indikator variabel tersebut juga menjadi fokus dalam penelitian.

Variabel penelitian adalah hal-hal yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Ferdinand, 2006: 77). Variabel dapat dirumuskan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hubungan antar variabel dengan variabel lain dapat dibedakan menjadi variabel stimulus atau bebas (variabel independen), variabel terikat (variabel dependen), variabel yang mempengaruhi atau memperlemah (variabel moderator), dan variabel penyela antara variabel independen dan variabel dependen disebut variabel intervening (Sugiyono, 2016:64-66).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penjelasan tentang variabel diatas maka variabel bebas dan variabel independen dalam penelitian kuantitatif sebagai data sekunder dalam penelitian kombinasi (*mix method*) dengan model campuran tidak berimbang (*concurrent embedded*) yang juga menjadi fokus penelitian ini adalah Budaya politik (Almon dan Verba, 1984), Partisipasi poliitik (Milbarth dan Goel), dan sikap Politik (Abu Ahmadi, 2009).

Tabel 3. Definisi Konsep

No	Variabel	Definisi
1	Budaya Politik	Kebudayaan Politik itu mengacu pada orientasi politik sikap warga negara terhadap peranan sistem politik dan sikap terhadap perananwarga negara yang ada di dalam sistem tersebut” (Almon dan Verba, 1984: 14)
2	Partisipasi Politik	Milbarth dan Goel. Partisipasi politik diklasifikasikan tiga tipologi yaitu Pemain (<i>Gladiator</i>), Penonton (<i>Spectator</i>), dan Apatis (<i>Aphatetic.</i>) (Miriam Budiardjo,2017:372)
3	Sikap Politik	Sikap dapat diartikan sebagai kesiapan merespon yang bersifat positif, negatif, dan juga netral terhadap objek atau situasi yang konsisten (Abu Ahmadi, 2009:153).

Tabel 4. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional	
		Indikator	Sub Indikator
Budaya Politik	Kebudayaan Politik itu mengacu pada orientasi politik sikap warga negara terhadap peranan sistem politik dan sikap terhadap perananwarga a negara yang ada di dalam sistem tersebut” (Almon dan Verba, 1984: 14)	1. Budaya Politik Parokial 2. Budaya Politik Subyek 3. Budaya Politik Partisipan	a. Pengetahuan tentang sistem politik (Sejarah, kekuasaan, dan sifat) b. pemahaman tentang struktur dan peranan (Kel.Kepentingan/Parpol) c. Pemahaman tentang kebijakan (Birokrasi/eks ekutif) d. Pemahaman tentang hak, kekuasaanya, kewajibannya, dan strategi memasuki

			orang yang berpengaruh
Partisipasi Politik	Milbarth dan Goel. Partisipasi politik diklasifikasikan tiga tipologi yaitu Pemain (<i>Gladiator</i>), Penonton (<i>Spectator</i>), dan Apatis (<i>Aphatetic.</i>) (Miriam Budiardjo, 2017:372)	1. Pemain	a. Aktif dalam dunia politik
		2. Penonton	b. Aktif menggunakan hak pilih
		3. Apatis	a. Tidak aktif dalam politik dan tidak menggunakan hak pilihnya
Sikap Politik	Sikap dapat diartikan sebagai kesiapan merespon yang bersifat positif, negatif, dan juga netral terhadap objek atau situasi yang konsisten (Abu Ahmadi, 2009:153).	Positif	Memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui pencalonan Ma'ruf Amin Sebagai calon Wakil Presiden
		Netral	tidak menunjukkan sikap setuju atau menolak pencalonan Ma'ruf Amin Sebagai calon Wakil Presiden
		Negatif	memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui pencalonan maruf amin sebagai Cawapres

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dapat ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penentuan lokasi penelitian juga memperhatikan keterbatasan seperti geografis dan praktis di lapangan, meliputi waktu, biaya dan tenaga (Molleong, 2005: 86). Oleh karena itu peneliti mempertimbangkan lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (*pusposive*) yaitu warga NU di Kota Bandar Lampung.

Pemilihan Bandar Lampung dalam penelitian ini peneliti melihat pada tiga aspek argumentasi yaitu historis, struktural, dan sosiologis. Secara historis, sejak Pendirian NU pada tahun 1964 di Lampung, kota ini menjadi salah satu kota tertua dalam sejarah NU di Lampung. Dimana saat itu terdapat tujuh cabang yaitu Teluk Betung, Kota Bumi, Menggala, Krui, Sukarame, Kota Agung, dan Talang Padang. Secara struktural, NU di Bandar Lampung dibawah PCNU Kota, memiliki akses informasi yang cepat dari pengurus NU tingkat atasnya yaitu PWNU karena PWNU berada di Kota Bandar Lampung. Secara sosiologis, kondisi heterogen yang ada di Bandar Lampung justru menambah keunikan tersendiri terkait kultur masyarakatnya.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Metode penelitian kombinasi campuran tidak berimbang (*Concurrent Embedded Strategy*) terdapat dua macam data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif sehingga data yang diperoleh menjadi lengkap dan akurat. Model penelitian ini terdapat dua metode sebagai metode primer dan sekunder. Pada model penelitian kombinasi tidak berimbang yang menggunakan metode kualitatif sebagai metode primer dan metode kuantitatif sebagai metode sekunder untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kualitatif sebagai metode primer (Sugiyono, 2016:541).

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian kualitatif yaitu diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan keterkaitan informan tersebut terhadap masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui panduan wawancara. Informan-informan yang menjadi unit analisis yaitu mewakili struktural organisasi (Pengurus NU) dan mewakili kultural individu warga NU (Kiai dan Tokoh Pesantren NU di Bandar Lampung), dan akademisi untuk mewakili kelompok netral.

Aspek pengurus, peneliti meneliti perwakilan pengurus Penasihat (Mustasyar), Pimpinan Tertinggi (Syuriah), dan Pelaksana Harian (Tanfidziah) PCNU Kota Bandar Lampung, serta diperkuat elemen struktural dari 5 MWCNU di lima kecamatan mayoritas NU. Sedangkan untuk menganalisis masyarakat NU secara kultural dan individu,

peneliti meneliti pengasuh dan santri Pondok pesantren Madarijul Ulum (Teluk Betung Barat) dan Al-Hikmah (Tanjung Karang Pusat) yang memiliki kaitan dengan NU serta diperkuat oleh pendapat para tokoh NU struktural.

2. Data sekunder

Penggunaan metode kombinasi campuran tidak berimbang (*Concurrent Embedded Strategy*) yang menginterpretasikan data kualitatif sebagai data primer dan data kuantitatif sebagai data sekunder, maka dalam penelitian ini memiliki data sekunder dari metode penelitian kuantitatif yang diperoleh dari kuisioner. Penggunaan data kuantitatif digunakan untuk memperoleh data pelengkap tentang sikap politik warga Nahdliyin dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

Data sekunder dalam penelitian ini juga dilengkapi data berupa Dasar hukum Pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 Ayat 28, serta jurnal dan artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, dan sebagainya.

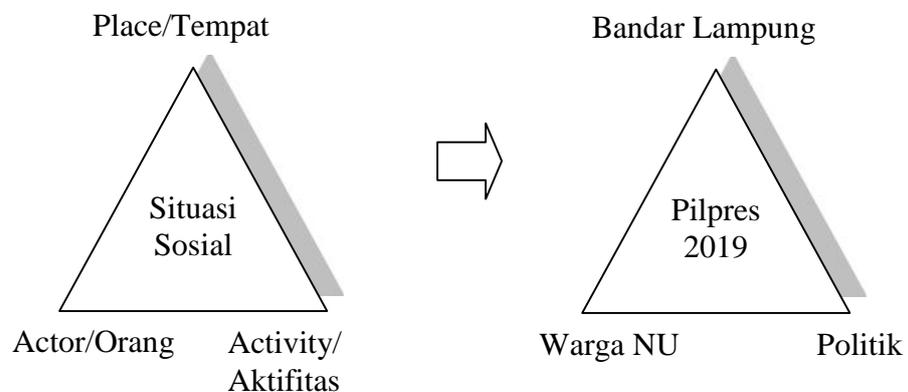
E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

a. Kualitatif

Penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan dalam terminologi populasi dan sampel. Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, akan tetapi Spradley menyebutnya dengan “*Social Situation*” atau sebuah keadaan sosial yang terdiri atas elemen tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui tentang apa yang terjadi didalamnya (Sugiyono, 2016:297-298).

Gambar 6. Situasi Sosial Penelitian Kualitatif



2. Kuantitatif

Penelitian kuantitatif mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian kuantitatif populasi tidak hanya merepresentasikan orang,

tetapi juga meliputi benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya kuantitas pada obyek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meeiputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut (*ibid.*, Hlm.119).

Populasi data kuantitaif sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh santri Pondok Pesantren Madarijul Ulum (Teluk Betung Barat) dan Pondok Pesantren Alhikmah (Way Halim) yang menjadi obejek penelitian dalam aspek kultur dari NU. Pondok pesantren dipilih karena sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ikatan kultural yang kuat dengan Nahdlatul Ulama .

2. Sampel

a. Kualitatif

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (*ibid.*, Hlm.119). Sampel pada penelitian kualitatif, bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalem penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (*ibid.*, Hlm.119).

Penentuan sampling atau sumber informan sendiri dilakukan dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur populasi (*nonprobability sampling*) sengaja dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) dan data dari jumlah keil menjadi besar hingga mampu memberikan data yang memuaskan (*snowball Sampling*) sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampling akan tetapi menggunakan istilah informan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah elemen warga NU yang dipandang cukup untuk memahami politik NU di Bandar Lampung. Informan dalam penelitian ini juga diperkuat oleh pendapat pihak ketiga dari kalangan akademisi politik.

Tabel 5. Data Informan dan Unit Analisis

No	Informan/Unit Analisis	Nama	Jabatan	Waktu dan Tempat
1	Struktural (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung)	Drs. KH. Hafiddudin Hanief	Mustasyar	Tanjung Karang Pusat, Senin, 26 November 2018 pukul 09.00-10.00 WIB
		KH. Izzudin Abdusalam	Rais Syuriah	Tanjung Karang Pusat, Selasa, 27 November 2018 pukul 10.00-11.30 WIB
		Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., M.M.	Ketua Tanfidziah	Kemiling, Sabtu, 24 November 2018 pukul 16.30-17.30 WIB
		Ustadz Abdurrahma	Ketua MWCNU	Tanjung Karang Pusat,

		n		Sabtu, 8 Desember 2018 pukul 15.00
		Ustadz Eko	Ketua MWCNU	Kemiling, Rabu, 5 Desember 2018 pukul 13.00-14.00 WIB
		Ustadz. Khusairi	Ketua MWCNU	Bumi Waras, Sabtu, 22 Desember 2018, Pukul 10.00 WIB
		Entus Sofyan	Ketua MWCNU	Kedaton, Jumat, 21 Desember 2018 Pukul 14.00
		Ustadz Khaikal	Ketua MWCNU	Panjang, Selasa, 11 Desember 2018 pukul 20.00
2	Kultural (Pengasuh pondok pesantren NU di Bandar Lampung)	KH. Ihya	Pengasuh Pondok Pesantren Madarijul Ulum	Batu Putuk, Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 16.00
		M. Fikriansah	Ketua Mahad Aly Madarijul Ulum	Batu Putuk, Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 17.00
		Drs. KH. Basyarudin Maisir	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar	Kedaton, Selasa, 8 Januari 2019 pukul 10.00
		Abdul Aziz, M.A.	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar	Kedaton, Jumat, 18 Januari 2018, Pukul 10.00
3	Tokoh NU Kultural Bandar Lampung	Muchtar Lutfi	Tokoh NU	Tanjung Karang Pusat, Minggu, 6 Januari 2019, Pukul 16.00
		Ustadz Juki	Tokoh NU	Panjang, Selasa, 11 Desember 2018 pukul 20.00

4	Tokoh NU Bandar Lampung	Arianto Munawar	Tokoh Politik NU Bandar Lampung/Ketua Rumah Kiai Maruf Amin (KMA) Lampung	Pahoman, Sabtu, 19 Januari 2019, Pukul 16.00
5	Pengamat NU	Iwan Satriawan, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Unila	Rajabasa, Sabtu, 19 Januari 2019, Pukul 16.00
		KH. Khairudin Tahmid	Akademisi UIN Lampung/Ketua MUI Provinsi Lampung	Sukarame, Senin, 21 Desember 2018, Pukul 13.00
6	Netral	Dr. A Bakir Ihsan	Peneliti dan Pengamat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta	Kamis, 7 Maret 2019, via e-mail

b. Kuantitatif

Sampel dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung secara kuantitatif politik warga NU kultural pondok pesantren kota Bandar Lampung yaitu Pondok Pesantren Madarijul Ulum dan Pondok Pesantren Alhikmah. Ketentuan tersebut dipilih karena metode kuantitatif dalam metode kombinasi campuran tidak berimbang (*Concurrent Embedded Strategy*) memposisikan data kuantitatif sebagai data sekunder.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:126). Teknik ini digunakan karena sampel yang dipilih disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tempat subyek penelitian merupakan tempat pendidikan pondok pesantren yang memiliki jenjang pendidikan dari Diniyah,

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Berdasarkan konteks penelitian terkait politik dalam pemilu maka santri jenjang yang masuk dalam usia pemilih seperti Madrasah Aliyah dan Pendidikan Tinggi.

Penggunaan *purposive sampling* juga didasarkan karena data penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan sebagai data sekunder dan data primer dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

a. Pondok Pesantren Madarijul Ulum

Bedasarkan data yang diperoleh dari pengasuh Pondok Pondok Pesantren Madarijul Ulum jumlah keseluruhan santri adalah 512 santri, Jumlah sampel yang diperoleh untuk meneliti sikap politik santri di Pondok Pesantren Madarijul Ulum berdasarkan kriteria usia pemilih, tempat asal, dan tingkat pendidikan maka sampel yang memenuhi kriteria yang digunakan untuk penelitian adalah sebanyak 75 santri.

b. Pondok Pesantren Al-Hikmah

Bedasarkan data yang diperoleh dari pengasuh Pondok Pondok Pesantren Al-Hikmah jumlah keseluruhan santri adalah 1200 santri, akan tetapi yang merepresentasikan usia pemilih adalah para santri yang mengenyam pendidikan Madrasah Aliyah yang berjumlah 213 santri. Secara *purposive sampling* populasi

dikerucutkan kembali menjadi santri Madrasah Aliyah yang duduk dikelas 12 berjumlah 80 orang, hal tersebut dikarenakan secara usia, sampel tersebutlah yang memasuki usia pemilih dalam pemilu dan memenuhi kriteria penelitian, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 69 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah langkah paling utama jika melihat dari tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), angket (kuisisioner), dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2016:308).

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (Burhan Bungin, 2003:13).

Guba dan Lincoln (1981) menjelaskan bahwa wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan terhadap subyek atau narasumber yang telah mengetahui makna dan tujuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara tidak berstruktur tetapi berfokus merupakan

wawancara yang pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subyek akan tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan (Basrowi dan Suwandi, 2008:130).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan panduan wawancara serta catatan-catatan wawancara terbuka dan wawancara tak berstruktur tetapi berfokus. Peneliti lakukan dengan struktur pengurus PCNU kota Bandar Lampung, warga nahdliyin Kota Bandar Lampung, dan Pengasuh Pondok Pesantren.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Burhan Bungin, 2003:14). Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mencatat hasil wawancara, pengambilan foto saat wawancara dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Observasi

Larry Cristensen (2004) menjelaskan bahwa observasi dalam penelitian diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang, karena apa yang dikatakan seseorang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan (Sugiyono, 2016:196-197).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi tidak berstruktur. Penggunaan teknik observasi tersebut digunakan untuk mengungkap fenomena yang sebelumnya tidak diketahui secara jelas dan tidak dipersiapkan secara sistematis. Peneliti melakukan pengamatan secara bebas, mencatat hal yang menarik, melakukan analisis, dan membuat kesimpulan.

4. Angket (Kuisisioner)

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kuisisioner (Angket). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab oleh responden (Sugiyono, 2016:193).

5. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang sudah ada. Triangulasi dibedakan atas dua jenis yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber merupakan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (*ibid*, hlm.327).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), angket (kuisisioner),

dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Triangulasi). Wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data kualitatif sebagai data primer, sedangkan kuisioner dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif sebagai data sekunder.

G. Teknik Pengolahan Data

1. Kualitatif

Tahapan penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah proses pengolahan data tersebut. Banyak para ahli yang mendefinisikan teknik pengolahan data. Efendi dkk dalam Singarimbun (1995: 240) membagi teknik pengolahan data dalam beberapa teknik diantaranya adalah:

- a. *Editing*, adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data-data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dan berbagai sumber terkait seperti media informasi yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang unik dari hasil pengamatan sehingga dapat disajikan dengan baik.

- b. Interpretasi data, dalam tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak termasuk subyek yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Penyesuaian terhadap lampiran penulisan juga ditentukan sehingga relevan dengan hasil penelitian.

2. Kuantitatif

- a. Pemeriksaan (*Editing*)

Editing merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti kembali apakah isian pada lembar pengumpulan data telah mencukupi .sebagai upaya menjaga kredibilitas dari data tersebut.

- b. Kode (*coding*)

Pemberian kode yaitu pemberian kode untuk identifikasi dan klarifikasidata penelitian kedalam skor numerik atau karakter simbol. *Coding* juga didefinisikan kegiatan mengklasifikasikan jawaban yang diperoleh dari responden berdasarkan kriteria tertentu.

c. Pemberian Skor (*Scoring*)

Scoring merupakan tahapan penentuan jumlah skor. *Scoring* dilakukan dengan memberi klasifikasi dan kategori atas jawaban dari pertanyaan kuesioner sesuai tanggapan responden, responden menjawab pertanyaan kuesioner dengan memberi tanda *check list* () pada jawaban yang ada pada lembar kuesioner, setiap jawaban responden diberi nilai skor atau bobot yang disusun secara bertingkat berdasarkan skala Guttman. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi="satu" dan terendah ="nol". peneliti menetapkan kategori untuk setiap pernyataan positif, benar diberi skor 1 dan salah diberi nilai 0, sedangkan kategori negatif benar diberi skor 0 dan salah diberi skor 1.

Tabel 6. Skoring Skala Guttman

Alternatif Jawaban	Skor Alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Benar	1	0
Salah	0	1

d. Tabulasi

Tabulasi merupakan teknik penyusunan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabulasi juga dilakukan untuk mempermudah menginterpretasikan data.

H. Validitas dan Reliabelitas Instrumen

Uji validitas dan realibilitas instrumen penelitian adalah langkah yang harus dilakukan setelah instrumen penelitian dibuat. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid diartikan dimana instrumen penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid dan reliabel adalah syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2016:168).

1. Validitas Instrumen

Peneliti melakukan pengujian konstruksi mengenai aspek-aspek yang diukur kepada ahli (*expert judgement*). Instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur berdasarkan teori yang digunakan, maka selanjutnya dikonsultasikan kepada ahli. Setelah sejumlah pernyataan dianggap relevan peneliti melakukan uji instrumen di MA Alhikmah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung sebanyak 30 santri. Penentuan jumlah sampel uji instrumen tersebut didasarkan pada pendapat Sugiyono bahwa jumlah anggota sampel yang digunakan untuk pengujian sekitar 30 orang (*ibid.*, Hlm.171).

Peneliti melakukan tabulasi data uji instrumen penelitian, setelah data uji instrumen diperoleh. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skal Guttman, maka peneliti menggunakan koefisien reproduibilitas dan koefisien skalabilitas.

Rumus yang digunakan untuk uji validasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Koefisien Reprodusibilitas (Kr)

$$Kr = 1 - \frac{e}{n}$$

Keterangan :

Kr : Koefisien Reprodusibilitas
 e : Jumlah kesalahan
 n : Jumlah total pilihan jawaban=jumlah pertanyaan x responden

Koefisien Skalabilitas (Ks)

$$Ks = 1 - \frac{e}{c(n - Tn)}$$

Keterangan :

Ks : Koefisien Skalabilitas
 e : Jumlah kesalahan
 k : Jumlah kesalahan yang diharapkan= c(n-Tn), c adalah kemungkinan memperoleh jawaban benar, karena opsi jawaban “Benar” dan “Salah” maka c= 0,5
 n : Jumlah total pilihan jawaban=jumlah pertanyaan x responden
 Tn : Jumlah pilihan jawaban

Setelah peneliti melakukan uji instrumen, dari sejumlah 30 responden dengan potensi salah sebesar 540 dan jumlah *error* sebesar 94, maka diperoleh hasil koefisien reprodusibilitas adalah 0,83 dan koefisien skalabilitas sebesar 0,64. Peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan program SKALO (program analisis skala Guttman). Hasil perhitungan aplikasi

terlampir, sedangkan perhitungan secara manual adalah sebagai berikut:

Koefisien Reprodusibilitas (Kr)

$$Kr = 1 - \frac{e}{n}$$

$$Kr = 1 - \frac{94}{540}$$

$$Kr = 1 - 0,17$$

$$Kr = 0,83$$

Skala dengan nilai $Kr > 90$ dianggap baik. Berdasarkan perhitungan diatas, penelitian ini memiliki skala dengan nilai Kr 0.83, maka nilai koefisien reprodubilitas hasil uji instrumen dianggap hampir memenuhi.

Koefisien Skalabilitas (Ks)

$$Ks = 1 - \frac{e}{c(n - Tn)}$$

$$Ks = 1 - \frac{94}{0,5(540 - 18)}$$

$$Ks = 1 - \frac{94}{0,5(522)}$$

$$Ks = 1 - \frac{94}{261}$$

$$Ks = 1 - 0,36$$

$$Ks = 0,64$$

Berdasarkan perhitungan koefisien skalabilitas, jika nilai $Ks > 0,60$ maka instrumen tersebut dianggap baik untuk digunakan dalam penelitian. Peneliti memperoleh hasil perhitungan Ks adalah 0,64

maka nilai koefisien skalabilitas ini dapat digunakan untuk penelitian.

2. Reliabelitas Instrumen

Pengujian reliabelitas instrumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara eksternal dan secara internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan cara *test-retest (Stability)*, *equivalent*, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabelitas instrumen dapat diuji dengan cara menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Peneliti menggunakan uji reliabelitas instrumen dengan menggunakan cara internal yaitu *Internal Consistency*. Peneliti mencoba instrumen satu kali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2016:178-179).

Peneliti menggunakan uji reliabelitas menggunakan rumus hitung KR 20 (Kuder Richardson), sebagai berikut:

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ \frac{s_r - \sum p_i q_i}{s_t^2} \right\}$$

Keterangan :

k : Jumlah item dalam instrumen

p_i : Proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1

q_i : 1- p_i

S_t^2 : Varians Total

Peneliti menggunakan KR 20 karena dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman dengan skor dikotomi 1 dan 0, hingga diperoleh tabulasi hasil perhitungan dengan tabel KR 20 terlampir.

Langkah selanjutnya adalah menghitung varians total yang kemudian dimasukkan dalam rumus KR 20. Adapun rumus varians total adalah sebagai berikut:

$$X_t^2 = \sum X_t^2 - \frac{(\sum X_t)^2}{n}$$

$$X_t^2 = 5813 - \frac{(415)^2}{30}$$

$$X_t^2 = 5813 - \frac{172.225}{30}$$

$$X_t^2 = 5813 - 5.741$$

$$X_t^2 = 72$$

$$S_t^2 = \frac{X_t^2}{n} = \frac{72}{30} = 2,4$$

Langkah selanjutnya adalah hasil varians total dimasukkan dalam perhitungan KR 20, sebagai berikut:

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ \frac{s_t - \sum p_i q_i}{s_{t,2}} \right\}$$

$$r_i = \frac{18}{(18-1)} \left\{ \frac{2,4 - 1439}{2,4} \right\}$$

$$r_i = \frac{18}{17} \left\{ \frac{0,961}{2,4} \right\}$$

$$r_i = 1,059 \times 0,400$$

$$r_i = 0,424$$

Berdasarkan perhitungan uji reliabelitas diatas maka diperoleh hasil sebesar 0,424 yang kemudian di interpretasikan dalam tabel kriteria reliabelitas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa reliabelitas cukup untuk digunakan dalam penelitian.

Tabel 7. Kriteria Reliabelitas

Nilai	Kriteria
-1,00-0,20	Reliabelitas Sangat Rendah
0,21-0,40	Reliabelitas Rendah
0,41-0,70	Reliabelitas Cukup
0,71-0,90	Reliabelitas Tinggi
0,91-100	Reliabelitas Sangat Tinggi

I. Teknik Analisis Data

1. Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Matthew B. Miller dan A. Michael Huberman (1992:17) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan (*slection*), pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga diartikan sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Peneliti melakukan reduksi data dimulai pada saat *pra riset* yakni wawancara yang tidak berstruktur namun tetep berfokus pada inti

permasalahan, selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan memahami tentang kultur NU yang ada di Kota Bandar Lampung, data dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudian dipilah agar dapat disajikan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan reduksi data kembali pada tahap pembahasan dan hasil.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan terhadap adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Data-data yang ada kemudian dikelompokkan dalam bagian atau sub bagian. Data yang disajikan kemudian disesuaikan dengan informasi yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Seperti data-data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan juga dokumentasi.

Pada penelitian ini, data-data yang dianggap penting dicantumkan sebagian pada hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah ditentukan sehingga dalam penyajian data memperoleh relevansi dan dapat diterima dengan logika, kemudian dalam penyajian data peneliti juga tetap mengacu pada

panduan penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan ejaan bahasa yang disempurnakan dan redaksional penulisan sehingga mempermudah pembaca memahami penyajian data dan tidak menimbulkan tafsiran (multitafsir) yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Secara lengkap hasil penelitian di lampirkan pada bagian lampiran.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, bisa juga tidak, hal tersebut dikarenakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelum belum jelas sehingga diperoleh kejelasannya berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

2. Kuantitatif

Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Kegiatan analisis berupa mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti,

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2016:199).

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif. Penggunaan analisis tersebut dikarenakan data kuantitatif dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menguji hipotesis, dan penelitian ini tidak berangkat dari teori yang sudah pasti digunakan, akan tetapi masalah diperoleh saat peneliti melakukan penelitian lapangan, maka data kuantitatif digunakan untuk memperkuat temuan-temuan data kualitatif yang ada di lapangan.

Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah presentase. Presentasi pada setiap kemungkinan jawaban diperoleh dari membagi frekuensi yang diperoleh dengan jumlah sampel penelitian, kemudian dikalikan 100 %. Perhitungan presentasi tersebut dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

- P : Prosentase
- f : Frekuensi dari setiap jawaban
- n : Jumlah
- 100% : Konstanta

Setelah dilakukan perhitungan persentase maka hasil perhitungan diinterpretasikan berdasarkan kategori persentasi dan data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kategori persentasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Persentase

Presentase	Kategori
0-1%	Tidak Ada
2-25%	Sebagian Kecil
26-49%	Kurang Dari Setengahnya
50%	Setengahnya
51-75%	Lebih dari setengahnya
76-99%	Sebagian Besar
100%	Seluruhnya

J. Teknik Validasi atau Keabsahan Data

Keabsahan sebuah data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan kualitas penelitian yang baik. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas (*Credibility*). Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016:369).

Peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber, peneliti menggunakan beberapa sumber data dari struktural NU

(Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidziah), Kultural meliputi kiai dan santri pondok pesantren, serta akademisi politik sebagai elemen netral dalam penelitian. Triangulasi teknik peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam setiap indikator penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat NU di Bandar Lampung

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi masyarakat keagamaan terbesar yang ada di Indonesia. NU berdiri sejak 31 Januari 1926 atau tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, Jawa Timur. Keberadaan NU di Bandar Lampung tidak terlepas dari sejarah kehadiran NU di Lampung itu sendiri.

Sejarah mencatat, sejak terpisahnya Lampung dari bagian Sumatera Selatan pada tahun 1964, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk mendataris yang diketuai oleh KH. Muhammad Zakri untuk menyusun Pengurus NU di Wilayah Lampung. Pada awal pendirian NU di Lampung pada tahun 1964, NU wilayah Lampung terdiri atas tujuh cabang yaitu; cabang Teluk Betung, Kota Bumi, Menggala, Krui, Sukarame, Kota Agung, dan Talang Padang.

Cabang teluk betung menjadi struktur cabang tertua NU yang ada di Bandar Lampung saat itu, mengingat kondisi pemerintahan daerah masih bersifat semi otonomi, maka di lampung ini terdiri dari beberapa cabang dimana cabang itu berada dipusat-pusat pemerintah negeri. Sebelum

pemilu 1957, wilayahnya NU Lampung masih menginduk dengan Sumatera Selatan bersama Jambi, Bengkulu, serta Lampung.

Kota Bandar Lampung pada mulanya terdiri dari dua kecamatan yaitu Tanjung Karang dan Teluk Betung sebagai kota administratif (terdapat walikota tetapi tidak ada DPR). Setelah Lampung menjadi provinsi maka Bandar Lampung ini menjadi kota besar (kota kembar). (Sumber: Muchtar Lutfi dalam wawancara dengan peneliti di Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung, pada 6 Januari 2019, Pukul 16.00 WIB).

Secara sosio kultural Bandar Lampung memiliki heterogenitas yang terdiri dari berbagai latar belakang yang majemuk di tengah masyarakat. NU sebagai organisasi masyarakat keagamaan tidak bisa dipisahkan dari kondisi masyarakat yang ada. Kondisi tersebut juga yang membedakan karakteristik dan kultur warga NU kota Bandar Lampung dibanding dengan warga NU di kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Lampung.

Perjalanan NU di Bandar Lampung memiliki dinamika peristiwa yang mewarnai jalannya organisasi tersebut. Beberapa kepemimpinan turut andil memberikan corak bagi NU di Bandar Lampung. Seperti Amir Hamzah dan Dr H thabrani Daud (sekitar tahun 1960-an), KH Jamra (1970-an), Kemudian pada tahun 1975-an dipimpin oleh Sarwani Sukur. Masa Sarwani Sukur terjadi patroh (gonjang-ganjing) antara aliran politik dan aliran ulama. Di Jakarta kelompok politik dipimpin oleh Dr Idam Khalid sedangkan aliran ulama dipimpin oleh Kiai Haji Maksum yang dikenal dengan tiga serangkai (Kiai Hajji Maksum, KH As'ad Arifin, KH

Ali Mkhafudz) yang kemudian lebih dikenal dengan kelompok situbondo. Kelompok Idam khalid dan kawan-kawan merupakan kelompok Cipete yang identik dengan politik. sedangkan tiga serangkai murni ulama.

NU di Lampung juga terpolarisasi, di kota terdapat pimpipinan Sarwani Sukur dan Malhani Manan yang berkembang antara tahun 1980-1982-an sekitar 3 tahunan terjadi patroh, kemudian muncul Mukhtamar Situbondo (1984) dimana mukhtamar tersebut mengangkat Gusdur sebagai ketua Tanfidz, Ra'is Suriah dipimpin oleh KH. Ahmad Sidiq (Kosneptor kembali kekhittah bersama Gusdur). Pengurus NU di Provinsi dan Kota kemudin di Bekukan dan dibentuk karteker untuk dilakukan konferensi. Berdasarkan konfrensi tersebut maka diputuskan Sarwani Sukur sebagai Ketua Cabang NU kota dan sekretarisnya Malhani Manan.

Kepemimpinan NU di Bandar Lampung berlanjut pada tahun 1995-2000 dipimpin oleh Hasyim Nur. Berlanjut pada tahun 2000an KH Hafidzudin Hanif dipilih sebagai (Ketua Cabang) selama 7 tahun sedangkan Rais Suriah dipimpin oleh KH Jamra. Saat ini PCNU Bandar Lampung dibawah kepengurusan ketua Tanfidziah Ichwan Adji Wibowo mulai berbenah secara struktural dari PCNU, MWCNU, hingga ke ranting-ranting yang ada di kelurahan di Kota Bandar Lampung (Sumber: Hafidzudin Hanif dalam wawancara dengan peneliti di Tanjung Karang Pusat kota Bandar lampung, pada 26 November 2018, pukul 10.00).

2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung

Struktur kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung Masa khidmat 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pengurus PCNU Kota Bandar Lampung

NO	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	KH. Badruzzaman	Mustasyar
2	KH. Muhammad Sobri	Mustasyar
3	Drs. KH. Hafiddudin Hanief	Mustasyar
4	Drs. KH Heriyudin Yusuf	Mustasyar
5	KH. Sukmaja	Mustasyar
6	Dr. KH. Zainul Abidin, S.H., S.Ag., M.Ag.	Mustasyar
7	Ir. Hi. Ichwanul Hakim	Mustasyar
8	KH. Cecep Sodri	Mustasyar
9	KH. Sufroni Alwi	Mustasyar
10	Daeng Kadir	Mustasyar
11	Drs. Hi. Masdar, M.M.	Mustasyar
12	Hi. Madrus Salam	Mustasyar
13	Hi. Yuhadi, S.H.I.	Mustasyar
14	Hi Tubagus Supaat	Mustasyar
15	KH. Izzudin Abdusalam	Rais Syuriah
16	Habib Umar Muhdor Al-Hadad	Wakil Rais Syuriah
17	KH. Rahmat Hidayat, S.Sos.I.	Wakil Rais Syuriah
18	KH. Muhar	Wakil Rais Syuriah
19	KH. Santoni Gaos	Wakil Rais Syuriah
20	Ki. Asep Syaefullah	Wakil Rais Syuriah
21	Ki. Irmansyah, S.Ag.	Wakil Rais Syuriah
22	KH. Hasan Hidayat, S.Pd.I.	Wakil Rais Syuriah
23	Habib Husen	Wakil Rais Syuriah

24	KH. Fatoni, M.Ag.	Wakil Rais Syuriah
25	Ust. Ahmad Sukandi, M.H.I.	Wakil Rais Syuriah
26	KH. Mustain	Wakil Rais Syuriah
27	Hi. Taufik Rahmat, S.Ag.	Katib
28	Muhammad Anwar	Wakil Katib
29	Abudl Jalil, S.Sos.I	Wakil Katib
30	Rodi Nikmat, S.Kom.I., M.Kom.I.	Wakil Katib
31	Ismail Soleh, S.Ad.	Wakil Katib
32	KH. Fahrul Rizal	Wakil Katib
33	Marsudi, S.Pd.I.	Wakil Katib
34	Dr. KH. Muhammad Hakiki	A'wam
35	H. Amirudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota A'wam
36	Kuswarak, S.E., M.M.	Anggota A'wam
37	Ust. Nurchozin	Anggota A'wam
38	Ust. Ubaidillah, S.Pd.I., M.M.	Anggota A'wam
39	Ust. Edi Rosadi	Anggota A'wam
40	Habib Ali Ridlo	Anggota A'wam
41	Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., M.M.	Ketua Tanfidjziah
42	Hi. Lukman Hakim, S.Ag.	Wakil Tanfidjziah
43	Drs. Haji Maswi	Wakil Tanfidjziah
44	Imam Mahali, M.Kom.I.	Wakil Tanfidjziah
45	Lulu'ul Ma'num	Wakil Tanfidjziah
46	Abdul Azis, S.H., S.Pd.I., M.Pd.I.	Wakil Tanfidjziah
47	Dikky Hidayat, M.Sc.	Wakil Tanfidjziah
48	Tubagus Sudrajat	Wakil Tanfidjziah
49	Rudi Irawan, M.Si.	Wakil Tanfidjziah
50	Hayatul Islam, S.E.	Wakil Tanfidjziah

51	Sudibyo Putra	Wakil Tanfidjiah
52	Habibul Mutaqin, S.H.I.	Sekretaris
53	Kusaeri, S.Ag., M.A.	Wakil Selretaris
54	Ade Wawan, M.Pd.	Wakil Selretaris
55	Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.	Wakil Selretaris
56	Muhammad Ali Asg Felayati	Wakil Selretaris
57	Maulidin Ansori, S.Sos.	Wakil Selretaris
58	Hi. Abdul Karim	Bendahara
59	Hi. Ainul Wafa	Wakil Bendahara
60	Ansori Mangkunegara	Wakil Bendahara
61	Mayrozi, S.H.I.	Wakil Bendahara
62	Aryanto	Wakil Bendahara
63	Rudi Kurniawan, S.T.P., M.H.	Wakil Bendahara
64	Haruman, S.E.	Wakil Bendahara

Sumber: <http://mui-lampung.or.id/2017/11/05/inilah-struktur-pcnu-kota-bandar-lampung-masa-khidmat-2017-2022/> diakses pada 28 Januari 2019 pukul 9.22.

Jumlah Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di Kota Bandar Lampung sendiri berjumlah 20 MWCNU berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kondisi saat ini masih dalam tahap transisi dan rekonstruksi kepengurusan di tingkat-tingkat kecamatan yang mulai dibentuk di masa kepengurusan Ichwan Adji Wibowo tersebut.

Tabel 10. MWCNU Kota Bandar Lampung

NO	MWCNU	NO	MWCNU
1	Kemiling	11	Kedaton
2	Tanjung Karang Pusat	12	Sukabumi
3	Teluk Betung Selatan	13	Rajabasa
4	Bumi Waras	14	Tanjung Senang
5	Panjang	15	Kedamaian
6	Tanjung Karang Barat	16	Enggal
7	Teluk Betung Tinur	17	Way Halim
8	Labuhan Ratu	18	Teluk Betung Utara
9	Sukarame	19	Langkapura
10	Teluk Betung Barat	20	Kedaton

Sumber: Wawancara Peneliti dengan Ketua PCNU Kota Bandar Lampung, diolah Peneliti (2018).

3. Warga NU di Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan ketua PCNU Kota Bandar Lampung jumlah warga NU Bandar Lampung belum bisa dihitung secara pasti dan belum ada data yang bisa dipertanggung jawabkan, namun PCNU mengklaim secara kuantitatif berada di angkaka 50-55 % penduduk muslim di Bandar Lampung. Jika diasumsikan dengan data BPS tahun 2016 dengan penduduk muslim Bandar Lampung sebesar 92,63 % atau 1.164.027 jiwa, itu artinya klaim warga NU di Bandar Lampung berkisar \pm 640.213 jiwa. Kecamatan dengan sebaran NU terbesar berada di Kemiling, Tanjung Karang Pusat, Bumi Waras, Panjang, dan Teluk Betung. (Sumber: Wawancara Peneliti dengan Ketua PCNU Kota Bandar Lampung, diolah Peneliti (2018)).

Bandar Lampung merupakan kota yang heterogen terdiri dari masyarakat baik asli daerah maupun pendatang. Warga NU di Bandar

Lampung terlihat berbeda dengan NU di daerah lain hal ini dikarenakan tidak semua orang Bandar Lampung berasal asli daerah ataupun dari Jawa dan Banten, tetapi juga terdapat dari Sumatera Barat dan lain-lain.

Jumlah warga NU Bandar Lampung belum bisa dihitung secara pasti dan belum ada data yang bisa dipertanggung jawabkan, akan tetapi PCNU mengklaim secara kuantitatif warga NU Bandar Lampung berada di angka 50-55 % penduduk muslim di Bandar Lampung. Jika diasumsikan dengan data BPS tahun 2016 dengan penduduk muslim Bandar Lampung sebesar 92,63 % atau 1.164.027 jiwa, itu artinya klaim warga NU di Bandar Lampung berkisar \pm 640.213 jiwa.

Kecamatan dengan sebaran NU terbesar berada di Kemiling, Tanjung Karang Pusat, Bumi Waras, Panjang, dan Teluk Betung. (Sumber: Ichwan Adji Wibowo dalam wawancara dengan peneliti di Kemiling, pada 14 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB).

4. Pondok Pesantren (Ponpes) NU di Bandar Lampung

a. Pondok Pesantren Madarijul Ulum

Ponpes Madarijul Ulum merupakan sebuah ponpes yang beralamat di Jl. WA Rahman, Gg. Simpang Makmur No.1, Kelurahan Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Ponpes ini mengajarkan beberapa ilmu keagamaan seperti *tahfidzul qur'an*, kitab kuning, Nahwu, serta kurikulum kutubut turots (kitab klasik).

Berdasarkan sejarahnya, Ponpes Madarijul Ulum bermula pada tahun 1989 KH Ihya Ulumuddin mendirikan sebuah majelis taklim yang diberi nama An-Nahliyah dimana majelis tersebut mengadakan pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja putra dan putri di kediaman KH Ihya Ulumudin. Pada tahun 1996, An-Nahliyah berubah menjadi pondok pesantren yang menjadi cabang dari sebuah ponpes milik seorang ulama terkenal yaitu almarhum KH Hayatunufus, yang kemudian diberinama Ponpes Al-Utrujyah Cabang 1. Kelurahan Keteguhan sesuai dengan nama Ponpes milik KH. Hayatunufus yang berada di Teluk Betung Barat. Dua tahun kemudian Ponpes Al-Utrujyah berubah nama menjadi Ponpes Salafiyah Tahfidzul Qur'an Madarijul Ulum.

Ponpes Madarijul Ulum memiliki fasilitas yang terbilang cukup maju untuk sebuah ponpes tradisional yang ada di Bandar Lampung. Fasilitas tersebut berupa Masjid, asrama santri, kantor, asrama pengasuh, dapur, gedung sekolah, lapangan, koperasi santri, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, gudang, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), dan klinik kesehatan.

Ponpes Madarijul Ulum juga memfasilitasi minat dan bakat santri dalam bentuk ekstrakurikuler seperti kajian kitab kuning (kitab salaf), pembinaan tahfidz dan tilawatil qur'an, berpidato, penelitian ilmiah, kepramukaan, pengembangan olahraga, pengembangan seni seperti *drumband*, *qasidahm hadrah*, pengembangan seni bela

diri, tahfidzul qur'an, pengembangan jurnalistik dan publistik, dan pengembangan keterampilan wirausaha.

b. Pondok Pesantren Al-Hikmah

Yayasan Pendidikan dan Perguruan Islam (YPPI) Al-Hikmah dibentuk pada tanggal 9 Januari 1988 berdasarkan kesepakatan Kiai Sobari bersama Muhammad Syarif Nur, Muhammad Ali Mukti, Sujud Syuhada, dan Drs. Syamsul Ma'arif, dengan Akta Notaris Jimmy Simanungkalit, SH, Nomor:31 Tanggal 9 Januari 1988.

Pada tahun 1989 seiring dengan jumlah santri yang semakin banyak dari berbagai daerah di Lampung sedangkan yayasan tersebut belum memiliki asrama, maka Kiai Sobari berinisiasi untuk bisa menampung para siswa/i dalam sebuah wadah pendidikan agama disamping madrasah yaitu pondok pesantren. Pada tanggal 1 November 1989 keluarlah Piagam Diniyah/ Pondok Pesantren dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung Nomor 04/PP/PKD.1989. Berdasarkan piagam tersebut kegiatan pengajaran menjadi sebuah lembaga pondok pesantren, meskipun saat itu belum memiliki asrama.

Tabel 11. Pendidikan YPPI Al-Hikmah

No	Jenis Pendidikan	Jenjang	Pembentukan	Akr edit asi
1	Formal	Raudhatul Atfal (RA/TK)	17 Febuari 1980	B
		Madrasah Ibtidaiyah (MI)	17 Febuari 1980	B
		Madrasah Tsanawiyah (MTs)	17 Febuari 1980	B
		Madrasah Aliyah	17 Januari 1987	B
2	Non formal	Majelis Taklim	-	-
		Madrasah Diniyah Mambaul Hikmah (Awaliyah, Wustho)	1999	-
		Pondok Pesantren	-	-
		Tahfidz Qur'an	-	-
		Pendidikan Muhadloroh	-	-
		Pendidikan Takhossus	-	-

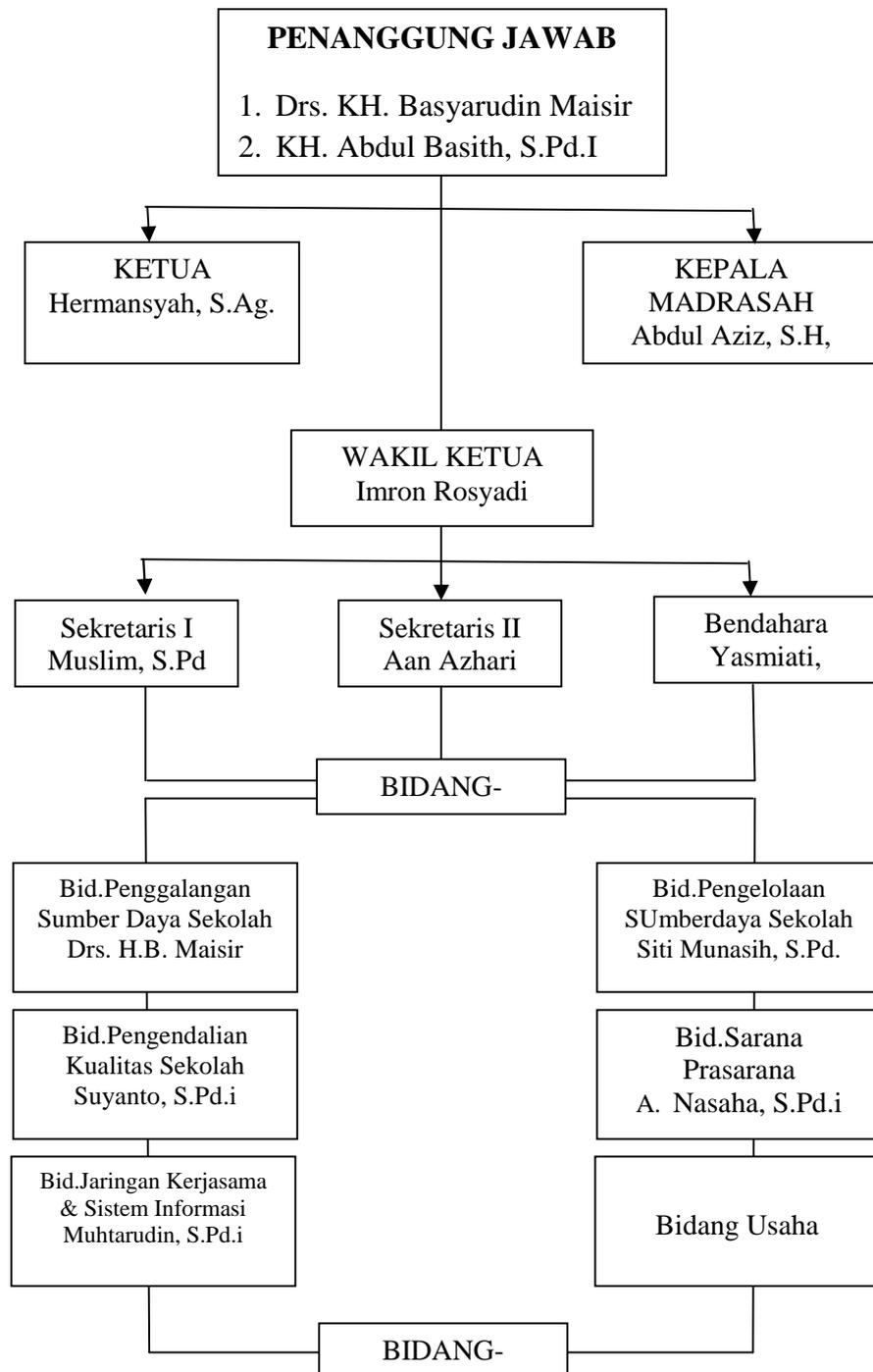
Sumber: YPPI AL-Hikmah

Rutinitas kegiatan santri Pondok Al-Hikmah biasanya dimulai sejak pukul 04.00 bangun dan sholat subuh dilanjut mengaji hingga sholat dhuha. Pukul 07.00 santri bersiap untuk berangkat kesekolah hingga pukul 12.00. Sepulang sekolah santri kembali untuk bersiap silat dzuhur dan mengaji hingga sore sesuai dengan sistem pendidikan pondok pesantren. Kegaitan santri setelah sholat maghrib biasanya dilanjutkan mengaji hingga sholat isya. Santri diperkenankan untuk istirahat setelah melaksanakan solat isya. Pukul 21.00-22.00 santri melaksanakan bimbingan baca Al-Qur'an. Kegiatan tersebut wajib diikuti oleh santri Al-Hikmah.

Kegiatan mingguan santri yang menjadi rutinitas di ponpes Al-hikmah seperti pengajian kitab Nashoihul dinniyah dilaksanakan setelah solat maghrib kemudian santri melaksanakan muhadhoroh yang dilakukan setelah solat isya. Kegiatan mingguan rutin lainnya seperti pembacaan surat yassin dan tahlil yang dilaksanakan setiap hari kamis setelah sholat maghrib. Setelah sholat isya santri mengikuti kegiatan minat dan bakat sesuai dengan pengembangan diri santri. Setiap hari jumat para santri membaca surat fadilah yaitu surat Ar-rahman, Al-waqiah, dan Al-Mulk, dimana kegiatan tersebut menjadi agenda wajib yang diikuti santri pondok Al-Hikmah.

Pengelolaan pondok pesantren Al-hikmah dilakukan secara kolektif dimana kiai seseorang yang memiliki otonomi tertinggi dilingkungan pondok pesantren dibantu oleh pelaksana harian (PLH). Ponpes Al-hikmah juga memberikan ruang kepada masyarakat dan keluarga dalam memajukan ponpes tersebut untuk kemaslahatan umat. Untuk menjalankan program dan kegiatan pondok pesantren maka dibentuk pimpinan-pimpinan lembaga, bidang, karyawan, tenaga pengajar, dan pengurus pesantren. Santri juga membentuk beberapa kelompok-kelompok minat bakat yang sesuai dengan potensi pengembangan diri masing-masing.

Gambar 7. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Hikmah



B. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden 2019

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil).

1. Gambaran Umum Tentang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2019

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dijelaskan dalam pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Bahwa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memnuhi persyaratan.

Pemilu Presiden yang dipilih untuk menempati posisi kepala negara dan pemerintahan di Indonesia dilakakuan secara langsung. Calon presiden dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali dalam jangka waktu masing-masing periode selama lima tahun. Partai politik atau koalisi partai politik pengusung Calon Presiden dengan ketentuan

memnangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi di DPR. Pemilu Presiden dapat dilakukan dalam dua kali putaran manakala tidak mencapai suara absolut dalam putaran pertama, dan putaran kedua dilakukan dengan dua calon suara terbanyak dalam putaran pertama.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 diikuti oleh dua pasang calon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019 yaitu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Tabel 12. Peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019

No Urut	Nama Calon Presiden	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Nama Calon Wakil	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Parpol Pengusung
01	 Ir. H. Joko Widodo	Pria	Presiden	 Prof. Dr. (HC). KH. Maruf Amin	Pria	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • PKB • PKPI • PDIP • Nasdem • Hanura • PPP • Golkar
02	 H. Prabowo Subianto	Pria	Swasta	 Sandiaga Salahudin Uno	Pria	Wakil Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrat • PKS • Gerindra • PAN

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

2. Sejarah Singkat Pemilu Legislatif dan Presiden di Indonesia

Kontestasi pemilihan umum di Indonesia sejak kemerdekaan telah digelar sebanyak 11 kali, yaitu pemilu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilihan umum yang telah berlangsung tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang memiliki andil menentukan hasil pemilihan umum tersebut (Miriam Budiardjo, 2017: 473).

a. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1952)

Pasca kemerdekaan, rencana pemilu sudah direncanakan sejak Oktober 1945 namun baru terlaksana oleh kabinet Baharudin Harahap pada tahun 1955. Pemungutan suara dalam pemilu tersebut dilaksanakan dua kali, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan menggunakan sistem pemilihan proporsional. Dilaksanakan secara khidmat dan demokratis, menghasilkan 27 partai dan satu perorangan dengan total 257 kursi anggota DPR dan 514 anggota konstituante (Mahan Demokrasi, 2015:3).

Terdapat 4 partai dengan perolehan suara terbesar di DPR yaitu Masyumi (57 kursi), PNI (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi). Perolehan kursi konstituante di dominasi oleh empat partai politik juga yaitu PNI (119 kursi), Masyumi (112 kursi), NU(91 kursi), dan PKI (80 kursi) (*ibid.*,.hlm.3). Pemilu 1955 hakikatnya merupakan realisasi dari maklumat Pemerintah yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta pada 3 November 1945 yang berisi tentang pembentukan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum (Sigit Pamungkas, 2011:167).

Stabilitas politik yang diharapkan dari pemilu tidak terwujud. Kabinet Ali yang memerintah selama 2 tahun terdiri atas kolaisi besar dari Masyumi, PNI, dan NU ternyata tidak kompak dalam menghadapi beberpa persoalan, khususnya terkait dengan konsepsi Presiden yang diumumkan pada 21 Februari 1957 dan beberapa menteri dari Masyumi keluar dari kabinet karena tidak setuju dengan konsep tersebut. Pembubaran Konstituante oleh Presiden Soekarno saat itu zaman demokrasi parlementer berakhir dan dimulailah zaman demokrasi terpimpin (Miriam Budiardjo, 2017: 474).

b. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10 setelah mencabut Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai. Kesepuluh partai tersebut

diantranya PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti. Zaman demokrasi terpimpin tidak terdapat pemilihan umum, dan partai-partai tersebut ikut dalam pemilu 1971 di masa orde baru (*ibid.*, hlm. 474).

c. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Sistem proporsional tahun 1955 tetap menjadi pilihan namun dengan beberapa modifikasi. Pertama, setiap daerah (Kabupaten/Kota Madya) dijamin mendapat satu kursi di DPR untuk menyeimbangkan jumlah anggota DPR di Jawa dan di luar Jawa. Kedua, dari 460 anggota DPR, 100 diantaranya diangkat yaitu 75 diantaranya dari ABRI dan 25 lainnya dari non-ABRI. Berdasarkan kompromi antara partai politik dan pemerintah (konsensus nasional) maka pemilihan umum 1971 diselenggarakan dengan 10 partai politik. Perimbangan jumlah anggota Parlemen dan penduduk dibuat perbandingan 1:400.000 (*ibid.*, hlm. 475-476).

1. Pemilu 1971

Tanggal 5 Juli 1971 menjadi pemilu kedua yang dilaksanakan dan pemilu pertama sesudah orde baru. Pemilu 1971 diikuti 10 partai politik dan partai politik baru Golongan Karya (Golkar) menjadi pemenangnya. Beberapa parpol pada pemilu 1955 tidak ikut serta lagi karena dibubarkan seperti Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI),

dan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Mahan Demokrasi, 2015:3).

Golkar menangantongi 34.348.673 suara (62,8 persen) atau 236 kursi DPR, disusul partai NU 10.213.650 suara (18,68 persen) atau 58 kursi DPR, Permusi 2.930.746 (5,36 persen) atau 24 kursi DPR, PNI dengan 3.793.266 (6,93 persen) atau 20 kursi DPR, dan PSII dengan perolehan 1.308.237 (2,39 persen) atau 10 kursi DPR, diikuti Parkindo (7 kursi), Partai Katolik(3 kursi), Perti (2 kursi), IPKI dan Murba dimana kedua partai tersebut tidak meraih kursi di DPR (Sigit Pamungkas, 2011:177).

Presiden Soeharto mengadakan beberapa kebijakan untuk menguasai kepartaian salah satunya adalah kebijakan fusi partai politik peserta pemilu. Pada tahun 1973 Presiden Soeharto mengemukakan pengelompokan partai menjadi tiga golongan yaitu Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasionalis (PDI), Golongan Spiritual (PPP). Formasi kepartaian ini bertahan hingga penghujung orde baru. Golkar menjadi partai hegemonik, sedangkan PPP dan PDI menjadi partai kelas dua (*ibid*,.hlm.178).

2. Pemilu 1977

Kebijakan berikutnya adalah dengan pembuatan Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa pengurusan partai terbatas pada Ibu Kota tingkat Pusat, Dati I, dan Dati II. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Pemilu tahun 1977 diikuti dengan tiga partai. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah massa mengambang (*floating mass*). Praktik ketentuan tersebut jelas menguntungkan Golkar karena gerka kedua partai lainnya dibatasi sedangkan Golkar memiliki akses gerak yang luas hingga ke desa-desa melalui aparat pemerintah setingkatannya (Miriam Budiardjo, 2017:476).

Proses penghitungan dalam pemilu 1977 tercatat bahwa dari 70 juta lebih pemilih, hampir 64 juta suara sah yang masuk atau sekitar 90,93 persen suara sah Golkar masih mendominasi perolehan suara partai pada pemilu 1977 dengan 62,11 persen. PPP memperoleh 29,32 persen, disusul PDI dengan perolehan 8,6 persen suara (Sigit Pamungkas, 2011:178).

3. Pemilu 1982

Pemilu 1982 dilakukan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem dan tujuannya sama dengan pemilu tahun 1977 yaitu untuk memilih anggota DPR. Hanya saja memiliki komposisi yang sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang lainnya diangkat oleh Presiden. Pemilu 1982 dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 1980 dan Golkar tetap menjadi pemenangnya (Mahan Demokrasi, 2015:5).

Suara sah dalam pemilu tahun 1982 mencapai 75 juta lebih dan Golkar masih menghegemoni kontestasi pemilu tersebut. Golkar memperoleh suara 64,34 persen atau mengalami kenaikan 2,21 persen dibanding pemilu sebelumnya. PPP masih berada di urutan kedua dengan perolehan suara 27,78 persen suara atau mengalami penurunan 1,54 persen dibanding pemilu sebelumnya. PDI berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 7,88 persen atau mengalami penurunan 0,72 persen suara dibanding pemilu sebelumnya (Sigit Pamungkas, 2011:178).

4. Pemilu 1987

Pemilu selanjutnya pada tahun 1987 dilakukan pada tanggal 23 April 1987. Sistem pemilu dan tujuan pemilihan memiliki kesamaan dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Jumlah kursi yang tersedia adalah 500 kursi, dimana 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden. Sistem proporsional dengan varian party-list masih menjadi sistem pemilu yang serupa dengan pemilu sebelumnya (Mahan Demokrasi, 2015:5).

Pemilu tahun 1987 terdapat 93 juta pemilih dan suara sah yang masuk sebesar 85 juta suara atau sebanyak 91,32 persen. Golkar memperoleh suara 73,16 atau mengalami kenaikan 8,82 persen suara dibanding pemilu sebelumnya. PPP tetap berada di urutan kedua dengan perolehan 15,97 persen suara atau

mengalami penurunan drastis sebesar 11,81 persen. Penurunan suara PPP dikarenakan pendukung yang kecewa dengan penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal, alhasil suara PPP sebagian terbagi ke Golkar dan PDI. PDI sendiri memperoleh suara 10,87 persen suara (Sigit Pamungkas, 2011:178).

5. Pemilu 1992

Pemilu 1992 merupakan pemilu kelima yang dilakukan secara periodik pada pemerintahan orde baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992 dengan sistem yang sama dengan pemilu 1982. Secara sistem pemilu, pemilu tahun 1992 tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilu 1992 sebanyak 105.565.697 suara dan suara sah mencapai 97 juta lebih suara (Mahan Demokrasi, 2015:6).

Golkar masih menjadi partai dominan dalam pemilu 1992 dengan perolehan 68,1 persen atau mengalami penurunan suara sebanyak 5,06 persen suara. PPP memperoleh 17 persen suara atau mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen suara dibanding pemilu sebelumnya. Serupa dengan PPP, PDI mengalami tren kenaikan sejak pemilu sebelumnya dengan perolehan suara 14,89 persen atau mengalami kenaikan 4,02 persen suara dibanding pemilu sebelumnya (Sigit Pamungkas, 2011:178).

6. Pemilu 1997

Pemilu era orde baru berakhir pada pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 dengan sistem dan tujuan yang sama dengan pemilu sebelumnya yaitu proporsional dengan varian party-list. Pemilu ini memilih 424 orang anggota DPR. Pada 7 Maret 1997 terdapat 2.289 kandidat calon legislatif yang bertarung memperebutkan kursi di parlemen (Mahan Demokrasi, 2015:6).

Suara sah dalam pemilu 1997 berjumlah hampir 113 juta suara. Hasilnya menunjukkan kekuatan partai Golkar yang semakin kuat dengan peroleh suara 74,51 persen suara atau mengalami kenaikan 6,41 persen suara. PPP tetap berada di urutan kedua dengan 22,43 persen atau mengalami kenaikan 5,43 persen suara. PDI tetap berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 3 persen saja atau mengalami penurunan sebesar 11,89 persen suara (Sigit Pamungkas, 2011:178).

d. Zaman Reformasi (1998-Sekarang)

1. Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Presiden Soeharto. Penolakan rakyat terhadap format “politik dua partai satu Golkar” sehingga diperkenalkannya sistem multi partai. Terdapat 48 partai politik yang terverifikasi Departmen Kehakiman sebagai kontestan pemilu. Hasil pemilu 1999 sangat mengejutkan, dimana dari 48 partai hanya 5 partai yang mampu memperoleh lebih dari 3 persen suara rakyat, 27 partai tidak mampu memperoleh kursi DPR serta 10 partai lainnya hanya mampu memperoleh 1 kursi di parlemen (Sigit Pamungkas, 2011:183)

PDIP memperoleh suara terbesar yaitu 33,73 persen, sementara Golkar 22,43 persen. Sebagai gerbong kelompok reformis PAN hanya mampu meraup 7,11 persen suara. PKB partai yang didirikan oleh kiai NU memposisikan dirinya pada peringkat ketiga dengan 12,6 persen, disusul PPP dengan 10,7 persen (*ibid.*, hlm 184-185).

Sistem pemilihan umum yang dipakai masih tidak terlalu beda dengan yang dipakai pada pemilihan umum sebelumnya. Landasan hukum pemilu 1999 adalah UU No. 2 Tahun 1999. Perbedaan antara Pemilu 1999 dan 1997 adalah pada pemilu 1999 penetapan calon terpilih didasarkan pada rangking

perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan (Miriam Budiardjo, 2017:484).

2. Pemilu 2004

Pemilu 2004 diadakan tiga pemilihan umum yaitu pemilihan legislatif sekaligus untuk memilih anggota DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama, dan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua. UU. No 12 Tahun 2003 menjadi dasar pada pemilu legislatif tahun 2004 yang diikuti oleh 24 Partai, tujuh partai suara terbesar yang masuk di DPR seperti Golkar, PDIP, PPP, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tahun 2004 diselenggarakan dengan sistem dua putaran. Sistem tersebut dilakukan jika pada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yaitu 50 persen plus satu, maka diadakan putaran kedua dengan dua peserta pasang calon yang memperoleh suara terbanyak (*ibid.*, hlm. 484).

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi demokrasi di Indonesia dimana untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presidennya secara langsung. Pada pemilu 2004 ditetapkan *parliamentary threshold (PT)* sebesar 2.5 persen. Apabila partai politik yang memperoleh suara dengan presentase kurang dari 2.5 persen tidak berhak memperoleh kursi di DPR. Proporsional dengan daftar calon terbuka

menjadi sistem yang digunakan dalam pemilu tahun 2004 tersebut. Proporsional daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiapdaerah pemilihan (Mahan Demokrasi, 2015:9).

Suara yang diperoleh partai-partai politik ditiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen. Pemilihan anggota parlemen digunakan sistem pemilu proporsioanal dengan varian proporsional daftar (terbuka), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) digunakan sistem pemilu *Single Non Transverable Vote (SNTV)*, sementara untuk memilih presiden digunakan sistem pemilihan mayoritas atau pluralitas dengan varian *Two Round Sistem* (Sistem Dua Putaran) (*ibid.hlm.9*).

3. Pemilu 2009

Pemilu era reformasi selanjutnya adalah Pemilu tahun 2009. Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan sevara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk periode 2009-2014. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 (Satu Putaran). Dasar hukum yang digunakam dalam pemilu 2009 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Jumlah kursi tiap Daerah

Pemilihan (Dapil) yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi (*Ibid.*, hlm. 10).

Pemilu 2009 menghasilkan 9 partai yang lolos *Presidential Treshold (PT)* diantaranya adalah Partai Demokrat (PD), Partai Golkar (PG), PDIP, PPP, PKS, PAN, PKB, Gerindra, dan Hanura. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdapat tiga pasangan calon, yaitu Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY), dan Jusuf Kala-Wiranto. Pasangan SBY-Boediono memenagkan mayoritas absolut sebesar 60,8 persen (Sigit Pamungkas, 2011:203).

4. Pemilu 2014

Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat setelah era reformasi yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) , serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk periode 2014-2019. Sementara untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014 muncul dua pasanga yaitu Prabowo Subianto- M. Hatta Rajasa dan Joko Widodo- Jusuf Kala. Pada perhitungan resmi KPU, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kala menang dengan 70.997.833 suara (53.15 persen) sedangkan Prabowo Sunbianto dan Hatta Rajasa dengan 62.576.444 suara (46.85 persen) (Mahan Demokrasi, 2015:11).

5. Pemilu 2019

Pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang akan memilih 570 anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD serta akan memilih presiden dan wakil presiden secara serentak. Sistem perhitungan dan penetapan jumlah kursi partai politik di dasarkan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 420 tentang Pemilihan Umum yang baru saja disahkan, penetapan perolehan kursi tiap partai politik menggunakan metode *Sainte Lague*.

Pasal 420 UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan metode *Sainte Lague* adalah suara sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7, dan seterusnya, kemudian setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, kemudian jumlah kursi ditentukan berdasar peringkat, apabila pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 kursi, maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan (Dapil) tersebut. Pemilu 2019 akan diikuti oleh 16 Parpol Nasional dan 4 Parpol Lokal.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Peneliti telah memperoleh jawaban dari rumusan masalah tentang Politik Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, studi pada warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Budaya Politik, Partisipasi Politik, dan Sikap Politik Warga NU Kota bandar Lampung:
 - a. Budaya Politik
 - (i) Warga NU struktural memiliki tipe budaya politik Partisipan karena memiliki pengetahuan (kognisi), perasaan (afeksi), dan penilaian (evaluasi) terhadap semua aspek seperti sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai obyek dalam sistem dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

- (ii) Budaya politik kiai dan santri kalangan pondok pesantren Al-Hikmah dan Madarijul Ulum adalah peralihan budaya politik subyek-partisipan karena memiliki penilaian yang baik terhadap obyek-obyek input akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam partisipasi individu.
- b. Partisipasi Politik
- (i) Partisipasi politik warga NU struktural dapat diklasifikasikan menurut Milbarth dan Goel dalam partisipasi politik Pemain (*Gladiator*). Klasifikasi tersebut didasarkan pada keaktifan warga NU struktural terlibat dalam politik praktis seperti Penyelenggara Pemilihan Umum, tim Pemenangan Calon, Partai Politik dan bahkan juga terlibat sebagai Calon Legislatif.
 - (ii) Warga NU kultural khususnya tokoh, kiai, dan santri kota Bandar Lampung dapat diklasifikasikan menurut Milbarth dan Goel kedalam partisipasi politik Penonton (*spectators*) dimana aktif dalam penggunaan hak pilih akan tetapi memiliki tingkat keterlibatan dalam politik praktis yang rendah.

c. Sikap Politik

- (i) warga NU struktural Kota Bandar Lampung memiliki sikap positif terhadap pencalonan Ma'ruf Amin dengan beberapa warga NU terlibat aktif dalam tim kemenangan. Berdasarkan hal tersebut juga warga NU struktural mengakui, menyetujui, dan mendukung Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
- (ii) Warga NU kultural kiai dan santri Kota Bandar Lampung sebagian memiliki sikap positif terhadap pencalonan Ma'ruf Amin. Sikap netral ditunjukkan oleh tokoh *sepuh* NU kultural dengan alasan kondusifitas ditengah masyarakat.

2. Alasan warga NU dalam menentukan sikap politiknya terhadap pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon presiden pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 diantaranya sebagai berikut:

a. Alasan Warga NU Struktural.

1. Pinsip dan Kebijaksanaan

Alasan fundamental yang membentuk sikap politik warga NU struktural Bandar Lampung adalah terletak pada prinsip dalam bertindak yang menjadi acuan normatif meliputi kebijaksanaan, luwes, dan moderat. kaidah *fiqh* dikatakan "*akhaffud-dararain*" (pilih kesalahan yang dosanya paling ringan). Warga struktural menilai bahwa sosok Ma'ruf Amin merupakan sosok calon wakil presiden yang tepat dibanding calon dari pasangan lainnya.

2. Pilpres Dimaknai Perjuangan Mempertahankan Idiologi Pancasila.

Bagi NU, Pancasila adalah sebagai idiologi bangsa yang sudah final, sehingga NU sangat antipati terhadap kelompok yang mencoba merongrong Pancasila yang dinilai berada dalam kubu yang berbeda dengan NU dalam Pilpres 2019 ini.

3. Ma'ruf Amin representasi politik NU.

Kendati NU tidak berpolitik praktis tetapi memiliki *bergaining* politik nasional yang kuat sebagai *civil society religion* terbesar di Indonesia. Jika tokoh NU kalah dalam pertarungan Pilpres 2019 seperti dalam Pilpres 2004 ketika Hasyim Muzadi dan Solahudin Wahid maju sebagai calon Wakil Presiden, maka publik semakain meragukan dan antipati terhadap kekuatan NU dalam politik. Adanya tokoh NU dalam posisi strategis negara seperti Wakil Presiden diharapkan akan mampu merepresentasikan kepentingan politik NU khususnya perjuangan kebijakan yang pro terhadap *jamiyah* dan *jamaah* baik kiai maupun pondok pesantren.

4. Alasan Irasional berupa *taqlid* kepada kiai.

warga NU struktural juga memiliki paradigma normatif berupa kepatuhan, adab, dan tata krama yang menajadi ciri khas NU khususnya budaya pondok pesantren seperti *taklid* dan menghormati guru atau kiai.

b. Alasan Warga NU Kultural.

1. Kiai Pondok pesantren

Sikap politik kiai NU struktural dan Kultural di Bandar Lampung dalam Pilpres 2019 ini cenderung sama dalam bersikap. Kiai pondok pesantren dengan pemahaman keilmuan yang tinggi memiliki alasan yang rasional seperti halnya warga NU yang ada di struktural. Alasan rasional kiai pondok pesantren lain adalah bahawa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang identik dengan NU, maka perlu adanya akses dengan kekuasaan yang dalam hal ini Ma'ruf Amin dinilai akan memperjuangkan kepentingan kiai dan pondok pesantren seperti legalitas pendidikan pondok pesantren yang pada akhirnya pesantren akan memperoleh kucuran dana sama halnya dengan lembaga pendidikan lain.

2. Santri Pondok Pesantren

Adanya peran mediator atau penghubung antara kiai kharismatik dengan santri yang memiliki peran dalam tranfer keilmuan dan kognitif terhadap nilai-nilai yang ada pada kiai kharismatik dan dianggap sebagai pedoman hidup yang dicontoh oleh seluruh santri pondok pesantren. Sehingga sebageian besar sikap positif santri terhadap Ma'ruf Amin adalah hasil penilaian irasional santri terhadap sikap yang diambil kiai pondok pesantrennya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan terkait Politik Nahdaltul Ulama Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, dengan studi pada warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Perlu Adanya Penyamaan Persepsi Tentang Khittoh 1926 Terhadap Politik Warga NU.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ditemukan ruang dimana Khittoh 1926 yang dicetuskan dalam Mukhtamar Situbondo sangat longgar karena bisa ditafsirkan bermacam-macam baik oleh *jamiyah* (organisasi) maupun *jamaah* (warga) baik kultural maupun struktural. Khittoh 1926 jelas hanya mengembalikan NU pada dasar berdirinya tetapi membebaskan warganya untuk berafiliasi dengan partai politik tertentu, padahal dalam implementasinya setiap individu manusia yang berpolitik (*zon politicon*), sehingga ketika mengatakan NU secara lembaga itu tidak berpolitik, akan tetapi secara individu kemudian berpolitik maka akan terjadi ambiguitas.

2. Pendidikan Politik di Kalangan Santri Pondok Pesantren

Perlu adanya kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam hal pendidikan politik, sehingga santri-santri pondok pesantren di Bandar Lampung khususnya lebih mengetahui tentang pendidikan politik.

3. Peran Mediator Dalam Mentransfer Pemahaman Pada Santri

Ustadz atau santri senior yang merupakan tangan kanan kiai kharismatik yang memiliki peran yang sangat penting dalam mentrasfer pemahaman (kognisi) selain nilai dan dogma agama juga dalam hal politik. Peran tersebut harus dimaksimalkan dengan baik kepada santri khususnya tentang pemahaman-pemahaman yang rasional sehingga santri memiliki pemahaman dan pertimbangan politik (*syiasah*) yang baik dan objektif meskipun tidak meninggalkan nilai-nilai santri yang santun dan patuh terhadap kiai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agusty, Ferdinan. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Almon, Gabreil dan Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Alfian. 1982. *Ilmu Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Fealy, Greg. 2003. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Hadiwijoyo, Suryo S. 2012. *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hague, Rod, dkk. 1998. *Comparative Government and Politic*. London: Macmillian Press.
- Heywood, Andrew. 1997. *Politic*. London: Macmillan Press.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PPM

- Karim, A. Gaffar. 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Mahan Demokrasi. 2015. *Sejarah Pemilu di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandar Lampung: KPU Kota Bandar Lampung.
- Molleong, J, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Moh. Mukri dkk. 2016. *NU Mengawal Perubahan Zaman*. Bandar Lampung: LTN PWNU Lampung.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia.
- Newton, Kneth dan Van Deth, Jan W. 2010. *Foundation Of Comparative Politic: Democracies Of The Modern World*. New York: Cambridge University Press
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik:Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta:Institute For Democracy and Welfarism.
- Purwanto. 2008. *Sosiologi Untuk Pemula*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Rahman, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sastroatmodjo, Sudjiono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang:IKIP
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2016. *Meode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta :Media Pressindo.

Jurnal:

- Arifianto, Alexander R. 2019. *Joko Widodo: Vulnarable Despite Strong Incumbency*. Nanyang Technological Universiy Singapore: RSIS Comentary. No.008.
- Burhani, Ahmad Najib dan Simandjuntak, Deasy. 2018. *The Maruf Amin Vice Presidential Candidacy: Enticing or Splitting Conservative Vote* ISEAS: Yusof Ishak Institute Analyse Current Event. ISSN2335-6677. No.51.

Goncing, Nurlira. 2015. *Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru (Nahdlatu Ulama Politic and The New Order Era)*. UNHAS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Vol 1 No 1.

Ihsomudin. 2014. *Construction of Social-Cultural and Political Orientation of The Follower of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) in The Post Reform Era In East Java Indonesia*. European Centre For Research Training And Development UK: Global Journal of Politics and Law Research. Vol.2., No.2.

Jati, Wasisto Raharjo. 2012. *Ulama dan Pesantren Dalam Dinamika Politik dan Kultural Nahdlatul Ulama*. Jurusan Studi Islam: Ulul Albab. Vol.13., No.1.

Karomani. 2009. *Ulama, Jawara, dan Umara: Studi Tentang Elit Lokal di Banten*. Unila: Jurnal Sosiohumaniora, Vol.11, No.2.

Kurniawan, Robi Cahyadi, dkk. (2018). *Clientelism in Bandar Lampung's Mayor Election 2015: A case study of Herman H. N. and M. Yusuf Kohar as candidate pair*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Vol.31., No.4. Hlm.400-426.

Makhasin, Luthfi. 2017. *Islamic Organisation and Electoral Politics: Nahdlatul Ulama and Islamic Mobilisation in an Indonesian Local Election*. UGM: PCD Journal. Vol.5., No.2.

Muhammad, Firdaus. 2015. *Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol.9, No.1.

Noor, Firman. 2014. *Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi*. P2P-LIPI: Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol.40, No.1.

Sadi, H. 2016. *Kiai dan Politik : Mengintip Motif Kiai NU (Nahdlatul Ulama) dalam Pemilu 2009*. Universitas PGRI Banyuwangi: Jurnal Ilmu Kependidikan, Vol.10, No.1.

Penelitian Terdahulu:

Adistia, Dita. 2016. Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thabroni Harun dan Komarunnizar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (*skripsi*). Unila.

Nico Purwanto. 2018. Perilaku Memilih Santri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017 (Studi Pada Pondok Pesantren Riyadlotut Thalibin, Pondok Pesantren Nurul Yaqin, dan Pondok Pesantren Nurul Huda) (*Skripsi*). Unila.

Nuzula, Nur. 2014. Politik Elit Nahdlatul Ulama (NU): Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2014 (*Skripsi*). FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Media Informasi:

<https://news.detik.com/berita/d-4489582/bpn-tepis-ucapan-hendropriyono-soal-ideologi-pancasila-vs-khilafah-di-pilpres-pada-30-Maret-2019-pukul-11.25-WIB>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181022133529-32-340408/hari-santri-dinilai-positif-bagi-pasangan-jokowi-maruf> diakses pada 4 Februari 2019 pukul 21.53 WIB

<http://makassar.tribunnews.com/2018/08/12/pengamat-uinam-ini-nilai-maruf-amin-jadi-representasi-politik-santri> diakses pada 4 Februari 2019 pukul 21.27 WIB

<http://lampung.tribunnews.com/2017/08/29/ribuan-warga-nu-di-lampung-gelar-aksi-tolak-full-day-school> diakses pada 3 Februari 2019 Pukul 0.36 WIB

<http://www.nu.or.id/post/read/88843/inilah-susunan-lengkap-pengurus-pwnu-lampung-2018-2023> diakses pada 2 Februari 2019 pukul 23.35 WIB

<http://mui-lampung.or.id/2016/07/08/1152/> diakses pada 2 Februari 2019 pukul 22.40 WIB

<http://www.lampost.co/berita-aryanto-munawar-dilantik-ketua-korwil-rumah-kma-lampung.html>, diakses pada 2 Februari 2019 pukul 9.57

<https://www.radenintan.ac.id/kh-maruf-amin-ampu-kuliah-umum-ekonomi-syariah-di-uin/> diakses pada 22 Februari 2019 pukul 8.56

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3614714/maruf-amin-jadi-cawapres-jokowi-warganet-serukan-alhamdullillahjoin>, diakses pada 14 September 2018 pukul 21.24.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/14/21334181/said-aqil-sebut-warga-nu-akan-dukung-maruf-amin-tetapi>, diakses pada 14 September 2018 pukul 21.31

<https://akurat.co/id-284738-read-warga-nu-yang-dukung-jokowimaruf-diprediksi-hanya-1000-orang>, diakses pada 14 September 2018 pukul 23.46

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/18/pdngq9428-pengamat-belum-tentu-warga-nu-pilih-jokowimaruf>, diakses pada 15 September 2018 pukul 0.01

<http://lampung.tribunnews.com/2018/08/03/santri-lampung-deklarasi-dukung-jokowi>, diakses pada 15 September 2018 pukul 10.01

<http://mui-lampung.or.id/2017/11/05/inilah-struktur-pcnu-kota-bandar-lampung-masa-khidmat-2017-2022/>, diakses pada 15 September 2018 pukul 11.03.

<http://www.nu.or.id/post/read/86221/survei-terbaru-muslim-di-lampung-72-persen-nu>, diakses pada 30 September 2018 pukul 1.00

<https://lampung.kemenag.go.id/artikel/28455/kantor-kementerian-agama-kota-bandar-lampung>, diakses pada 30 September 2018, pukul 9.50

<https://ofang.wordpress.com/2014/02/13/nu-struktural-dan-nu-kultural-i/>, diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 17.16

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>, diakses pada 10 Oktober 2018, pukul 6.44

Sumber Lain :

Alvara Research Desember 2016

Survey Kuadran Februari 2018

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kependudukan 2016